

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG *GLOBAL FRAGILITY ACT* (GFA)
AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI KONFLIK GENG DI HAITI
(2019-2025)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Farrel Pradana Widodo

22323155

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG GLOBAL FRAGILITY ACT (GFA)
AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI KONFLIK GENG DI HAITI
(2019-2025)**

SKRIPSI

Diajukan kepada program studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Farrel Pradana Widodo

22323155

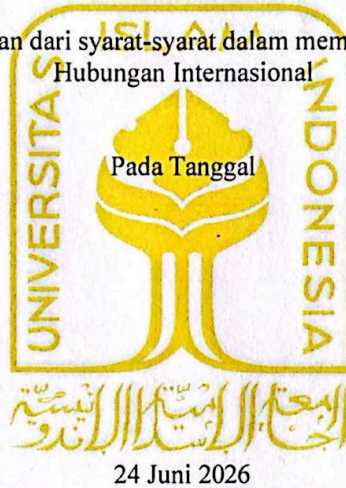
**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG *GLOBAL FRAGILITY ACT* (GFA) AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI KONFLIK GENG DI HAITI (2019-2025)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana S1
Hubungan Internasional



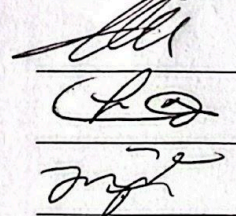
Mengesahkan



Dewan Penguji

- 1 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 2 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.
- 3 Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.

Tanda Tangan



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farrel Pradana Widodo
Tempat dan Tanggal Lahir : Kudus, 18 Juni 2004
Alamat : Kampung Baru Damai Blok B6, Depok Jawa Barat
NIM : 22323155
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Mei 2026



Farrel Pradana Widodo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Cakupan penelitian.....	10
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	13
1.7 Argumen Sementara.....	15
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 Jenis Penelitian.....	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian.....	17
1.9 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	18
DINAMIKA IMPLEMENTASI GLOBAL FRAGILITY ACT TANTANGAN, DAN	
FAKTOR.....	18
2.1 Intervensi Amerika Serikat dan Akar Konflik Geng di Haiti.....	21
2.1.1 Tujuan Global Fragility Act Dalam Mengatasi Konflik Negara Rentan...	23
2.2 Bentuk Implementasi Global Fragility Act (GFA) di Haiti (2019-2025).....	24
2.2.1 Pergeseran Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Global	
Fragility Act.....	27
BAB III.....	31
GLOBAL FRAGILITY ACT DALAM TINJAUAN.....	31
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT	
DI HAITI.....	31
3.1 Communication Sebagai Instrumen Krusial Dalam Pendekatan Kebijakan.....	32
3.1.1 Transmission Instruksi Komunikasi Kebijakan GFA.....	34
3.1.2 Consistency Dalam Penetapan Implementasi Kebijakan GFA.....	36
3.1.3 Clarity sebagai Instrumen Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan GFA	37

3.2 Resources sebagai faktor pendorong dari Global Fragility Act.....	40
3.2.1 Staff Pendukung Sumber Daya Kebijakan GFA.....	42
3.2.2 Information Penunjang Implementasi Kebijakan GFA.....	43
3.2.3 Authority Dalam Pembagian Sumber Daya Kebijakan.....	45
3.2.4 Facilities, keterbatasan Fasilitas Sebagai Hambatan implementasi Global Fragility Act.....	47
3.3 Disposition sebagai sikap dan perspektif implementor dalam keberhasilan implementasi kebijakan.....	49
3.3.1 Effect of Dispositions Dalam Implementasi Kebijakan.....	51
3.3.2 Staffing the Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan.....	52
3.3.3 Incentive Dalam Meningkatkan Komitmen Pelaksana Kebijakan.....	54
3.4 Structure Bureaucracy Dalam Mengatur Kebijakan Publik.....	55
3.4.1 Standard Operating Procedures Dalam Mengatur Kebijakan Global Fragility Act.....	58
3.4.2 Fragmentation Dalam Kebijakan Global Fragility Act.....	59
BAB IV	62
PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Rekomendasi Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data 2019-2023 laporan eskalasi konflik negara prioritas GFA Sumber: ACLED (2024).....	3
Gambar 1.2 Data 2018-2025 laporan kekerasan akibat geng di Haiti.....	4
Gambar 3.1 Corruption Perception Index dalam Pemerintahan Haiti.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat pembunuhan dan kekerasan akibat geng Haiti.....	2
--	---

DAFTAR SINGKATAN

ACLED	: Armed Conflict Location & Event Data Project
CARICOM	: Caribbean Community
Ex-FADH	: Ex-Forces Armées d'Haïti
FADH	: Forces Armées d'Haïti
FCV	: Fragility, Conflict, and Violence
GFA	: Global Fragility Act
HCG	: Haitian Coast Guard
IMF	: International Monetary Fund
MSS	: Multinational Security Support
NSC	: National Security Council
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
POLIFRONT	: the Haitian National Border Police
SAR	: Stabilization Assistance Review
SOP	: Standard Operating Procedure
UN	: United Nations
UNFPA	: United Nations Population Fund
USAID	: United States Agency for International Development
WoGA	: Whole of Government Approach

ABSTRAK

Global Fragility Act (GFA) kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas di negara rentan, dan mencegah konflik akibat konflik geng di Haiti pada periode 2019-2025 dengan menggunakan teori *Implementing Public Policy* dari George C. Edwards III, dengan penemuan penelitian bahwa, kebijakan GFA belum secara optimal dalam mengatasi konflik geng secara signifikan. Tantangan utama dalam kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya yang terbatas, sikap atau komitmen yang lemah, dan birokrasi yang kompleks. Implementasi kebijakan GFA lebih berfokus pada kepentingan Amerika Serikat, dalam melindungi warga Amerika Serikat, daripada mengatasi akar konflik di Haiti. Oleh karena itu GFA belum secara optimal dalam menciptakan stabilitas dan penuntasan konflik geng yang berkepanjangan di Haiti. **Kata Kunci:** *Global Fragility Act*, Haiti, Amerika Serikat, Kebijakan Publik

ABSTRACT

Global Fragility Act (GFA), is a United States foreign policy initiative aimed at increasing stability in vulnerable countries and preventing conflict, particularly due to gang violence in Haiti, during the 2019-2025 period. This initiative is analyzed using George C. Edwards III's theory of *Implementing Public Policy*. Research indicates that the GFA has not effectively addressed gang conflict in Haiti. The main challenges facing the policy include issues with communication, limited resources, weak commitment, and complex bureaucracy. Additionally, the interests of the United States, particularly the protection of U.S citizens, over addressing the root causes of conflict in Haiti. As a result, the GFA has not succeeded in creating lasting stability or resolving gang violence in the country. **Key Words:** *Global Fragility Act*, Haiti, Gang Violence, Policy Implementation, United States.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat meresmikan Undang-undang *Global Fragility Act* dalam kongres ke 116 Amerika Serikat. Undang-undang GFA ini dibentuk pada tahun 2019 dan dikembangkan pada masa kepemimpinan Joe Biden sebagai upaya preventif untuk mengatasi konflik global, dan mencegah krisis migrasi akibat kemiskinan ekstrim, serta konflik geng berkepanjangan yang membawa gelombang imigran dan pengungsi. Amerika Serikat menetapkan berbagai negara untuk menjadi fokus dalam mengatasi konflik ini, ada wilayah pesisir Afrika Barat seperti Ghana, Benin, Libya, Mozambik, Papua Nugini dan Haiti, namun seiring berjalannya waktu Haiti menjadi fokus utama karena dalam jangka waktu 2019-2025, eskalasi warga yang terbunuh makin meningkat akibat kelompok geng (Rios and Seelke 2024, 20).

Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Haiti selama implementasi *Global Fragility Act* selain memberikan bantuan dana sebesar 200 juta dollar AS per tahun selama lima tahun, dengan memberikan pendidikan bagi kepolisian nasional Haiti, membantu Haiti untuk memperkuat pemerintahannya dengan cara mendorong transparansi terkait anggaran tahunan yang digunakan, dan mendorong untuk anti korupsi yang marak terjadi di Haiti, serta membantu untuk mereformasi perekonomian dengan cara memberikan pendidikan bagi para

komunitas untuk tidak terjerumus ke dalam geng, dengan menggandeng berbagai organisasi internasional (Yayboke dkk. 2021, 4–7).

Namun, dalam implementasinya selama 5 tahun pertama Haiti (2019-2025) belum secara maksimal dalam menekan tingkat kekerasan akibat konflik geng di Haiti, hal ini bisa dilihat dalam tingginya tingkat pembunuhan dan tingkat kekerasan masih menjadi tantangan bagi pemerintah Haiti, yang disajikan pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Tingkat pembunuhan dan kekerasan akibat geng Haiti

Tahun	Pembunuhan	Kekerasan
2019	736	22
2020	900	40
2021	894	16
2022	181	418
2023	381	226
2024	2.505	590
2025	5.915	2.708

Sumber: Réseau National de Défense des Droits Humains (2022), United Nations Human Right (2023), United Nations Integrated Office in Haiti (2024), United Nations Integrated Office in Haiti (2025)

Dalam laporan *Réseau National de Défense des Droits Humains* (RNDDH) menjelaskan pada tahun 2019 terdapat 736 kasus pembunuhan dan 22

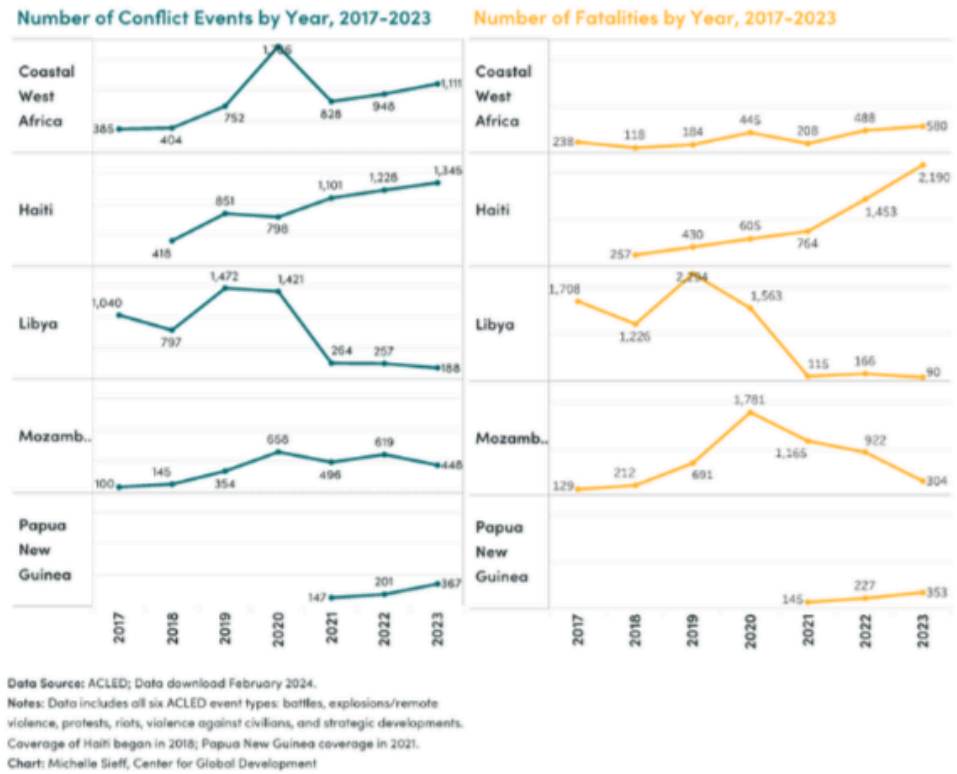
kasus kekerasan, pada tahun 2020, 900 kasus pembunuhan dan 40 kasus kekerasan, pada tahun 2021, 894 kasus pembunuhan dan 16 kasus kekerasan, lalu serangan tersebut juga menghancurkan seperti rumah, toko yang dibakar dan dijarah akibat serangan kelompok bersenjata yang terjadi di seluruh kota Haiti secara keseluruhan (RNDDH 2022, 2).

Dalam laporan *United Nations Human Right* pada tahun 2022 dan 2023 menjelaskan tentang 181 kasus pembunuhan dan 418 kasus kekerasan pada 2022 dan 381 kasus pembunuhan dan kasus kekerasan 226, yang terjadi di kota *Petite Rivière de l'Artibonite, Liancourt, Gros Morne, dan Saint-Marc* selain aksi kekerasan pada warga sipil kelompok bersenjata juga melakukan penghancuran rumah sebagai menyebarkan rasa takut kepada lawan (UNHCR 2023, 5-6)

Dalam laporan *Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti* di tahun 2024 terdapat 2.505 kasus pembunuhan, dan 590 kasus kekerasan, yang diantaranya merupakan polisi yang bertugas saat mengatasi konflik, dan aktor yang terlibat dalam aksi kekerasan ini merupakan kelompok bersenjata *Viv Ansanm* yang terjadi di kota *Port au Prince, Croix-des-Bouquets dan Cité Soleil* (BINUH 2024, 4)

Dalam laporan *Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti* tahun 2025 menjelaskan 5.915 kasus pembunuhan, dan 2.708 kasus kekerasan yang konflik terbesar terjadi di dua kota *Port-au-Prince* yang menjadi pusat terjadi konflik, dan kota *Artibonite* perluasan kekerasan yang terjadi dari ibu kota hingga daerah pedesaan (BINUH 2025, 18-24).

Gambar 1.1 Data 2019-2023 laporan eskalasi konflik negara prioritas GFA



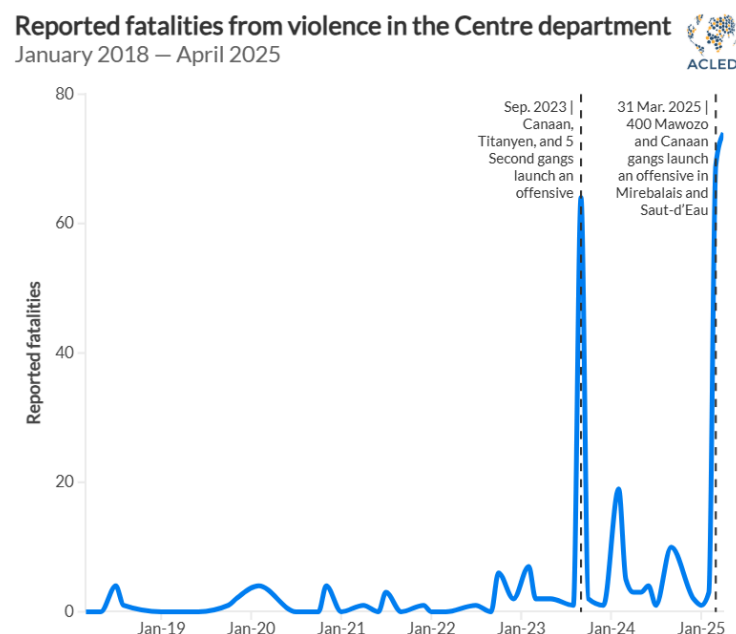
Sumber: ACLED (2024)

Berdasarkan data ACLED, Haiti mengalami peningkatan terkait peristiwa konflik maupun korban tewas. Walaupun pada tahun 2020 jumlah korban konflik mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah korban jiwa meningkat dari 736 menjadi 900 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan konflik yang terjadi semakin memburuk. Setelah tahun 2021, terjadi peningkatan pembunuhan hingga 5.015 korban pada tahun 2025, yang mengindikasikan menguatnya kelompok geng bersenjata serta menurunnya kapasitas dalam menjaga keamanan (Sieff 2020).

Dalam pengaruh Amerika Serikat di Haiti melalui GFA, membuat pengaruh dari sistem pemerintahan Haiti menjadi terbatas, dengan penunjukan

Ariel Henry sebagai perdana menteri setelah terbunuhnya Jovenel Moïse di tahun 2021 membuat segala keputusan harus berdasarkan Washington dan bukan berdasarkan dari rakyat Haiti, dengan mengatasmakan GFA dan kekerasan geng di Haiti membuat kedudukan dari Amerika Serikat atas negara Haiti menjadi sangat kuat, dan Haiti kembali menjadi justifikasi keamanan dan militer Amerika Serikat bukan untuk rakyat Haiti (Pierre 2023, 244–50).

Gambar 1.2 Data 2018-2025 laporan kekerasan akibat geng di Haiti



Sumber: ACLED (2025)

Dalam laporan ACLED menunjukkan kasus kekerasan yang terjadi di kota *Saut-d'Eau* dan *Canaan*, data menunjukkan peningkatan yang signifikan penyerangan geng yang mengarah terhadap infrastruktur di kota tersebut, penyerangan ini terjadi dikarenakan kapasitas negara yang semakin lemah,

pandemi Covid-19, geng yang mulai memperluas wilayah kekuasaan menjadi tantangan dalam berjalannya secara jangka panjang dalam implementasi undang-undang ini, karena dalam melakukan upaya preventif negara dalam mengatasi konflik di suatu negara membutuhkan dana yang tidak kecil membuat Kongres Amerika Serikat harus memastikan secara jelas dalam membagi pendanaan dalam anggaran tahunan yang dibuat oleh Amerika Serikat, dalam melakukan bantuan ini Kongres AS menetapkan anggaran dana sebanyak \$1,15 miliar/lima tahun, yang di mana dana itu dibagi menjadi dana stabilisasi sebanyak \$200 juta/tahun dan *Crisis Fund* sebanyak \$30 juta/tahun untuk negara yang menjadi fokus utama dalam penetapan undang-undang tersebut (Yayboke dkk. 2021, 5).

Implementasi *Global Fragility Act* di Haiti belum sepenuhnya mampu menciptakan stabilitas keamanan. Penguatan kebijakan masih diperlukan karena meningkatnya kepentingan Amerika Serikat berpotensi menghambat efektivitas GFA dalam mengatasi konflik. Sebagai upaya lanjutan, Amerika Serikat menetapkan geng *Viv Ansanm* dan *Gran Grif* sebagai *Foreign Terrorist Organization* (FTO) akibat meningkatnya ancaman yang ditimbulkan terhadap masyarakat *Port-au-Prince*. Penetapan tersebut berdasarkan karakteristik dan masing-masing kelompok yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama (Kolbe 2013, 4–5).

1. Geng Urban

seperti *Lame Ti Machete*, *Boi Neuf*, *Armee Sans Tete*, *Baze Solino*, *Baz Labanyé*, kelompok ini termasuk dalam bentuk yang kecil yang biasanya berada di daerah yang ramai, dan grup ini tidak terafiliasi dengan gerakan

politik apapun, namun berada dalam lingkungan para pebisnis yang berada di Haiti untuk melindungi bisnis mereka dari lawan, geng ini tidak berfokus terhadap narkoba, namun berfokus di bidang barang kesehatan, jasa pemakaman, jasa memperbaiki rumah, atau event musik (Kolbe 2013, 4–5).

2. Ex-FADH

Kelompok (*Forces Armées d'Haïti*), terdiri dari mantan personel militer Haiti yang dibubarkan pada tahun 1997, seperti *Group Zero*, *Cannibal Army*, dan *Lambi 12 Grande Saline*. Kelompok ini memiliki struktur komando yang terorganisasi, melakukan perekrutan serta pelatihan anggota, dan sering menargetkan fasilitas militer untuk memperoleh perlengkapan. Ex-Fadh juga menjadi kelompok yang berperan penting dalam penggulingan Presiden Jean-Bertrand Aristide pada tahun 2004.

3. Private Militias

merupakan kelompok yang berisikan militer swasta, yang mengidentifikasikan diri mereka yang pernah bekerja untuk perusahaan keamanan swasta, dibayar untuk melakukan aksi kriminal seperti penjualan manusia, penghancuran serikat pekerja dan penculikan. Tentara bayaran ini tidak terafiliasi dengan partai politik ataupun kelompok manapun, dan para kelompok ini biasanya dipersenjatai dan memiliki satu pemimpin, kelompok militer swasta ini berperan dalam penyerangan fasilitas militer di ibu kota *Port au Prince* tahun 2024.

4. Jaringan Kriminal

para anggota militer ini tidak secara spesifik memiliki nama terkait

kelompok, namun biasanya terasosiasi dengan kelompok yang memiliki kuasa ataupun kelompok yang dikendalikan oleh keluarga berpengaruh di Haiti, kelompok kriminal ini berkecimpung di dunia legal maupun ilegal, seperti bisnis ekspor impor, senjata, atau cuci uang, para anggota biasanya dipersenjatai dan dibiayai oleh keluarga yang berpengaruh untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan bisnisnya, dalam pengelompokannya tidak ada nama spesifik, namun geng ini tergabung menjadi koalisi yang biasa dikenal G9 and Family Member, yang menjadi aktor dalam penyerangan fasilitas Université d'État d'Haïti pada Februari 2024.

Untuk mengatasi dominasi geng di Haiti, Amerika Serikat mengeluarkan *Stabilization Assistance Review* (SAR) untuk mengintegrasikan pendekatan sipil dan militer dalam mengatasi konflik. Selain itu, Amerika Serikat membentuk *Strategic Prevention Project* yang berfokus dalam penguatan kohesi sosial dan reformasi lokal, sebagai upaya pencegahan konflik. Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi atas intervensi Amerika Serikat di Afghanistan yang menghabiskan banyak biaya besar dengan hasil yang terbatas. Pengalaman tersebut mendorong Amerika Serikat mengembangkan pendekatan yang lebih melalui *U.S Institute of Peace* (Yayboke dkk. 2021, 5).

Dalam menjalankan strategi stabilitasnya, Amerika Serikat melibatkan berbagai organisasi internasional, seperti *World Bank*. melalui strategi *Fragility, Conflict and Violence* (FCV), PBB melalui strateginya *Multinational Security Support*, upaya tersebut sebagai pencegahan dini terhadap kekerasan dan

dampaknya terhadap perekonomian dan keamanan (Ingram dan Lindborg 2019, 3).

Implementasi Undang-Undang ini menjadi tujuan penting Amerika Serikat untuk mengurangi adanya konflik global yang terjadi, dan diharapkan bisa menjadi *Game Changer* atau pengubah keadaan dalam mengatasi konflik berkepanjangan. dan Amerika Serikat ingin menciptakan pendekatan kolaboratif antar lembaga di kawasan Haiti (United States Department of State 2020, 3).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Undang-Undang *Global Fragility Act* (GFA) Amerika Serikat dalam merespon konflik geng di Haiti pada periode 2019 - 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dari Implementasi Undang-Undang *Global Fragility Act* Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Donald Trump pada tahun 2019 dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Joe Biden dalam mengatasi ketidakstabilan negara akibat konflik geng yang terjadi di Haiti untuk menciptakan keamanan di wilayah Amerika Serikat untuk menghindari adanya imigran ilegal akibat konflik dan penyebaran narkoba di kawasan Amerika Serikat pada periode tahun 2019-2025:

1. Untuk meninjau pendekatan implementasi Undang-undang GFA dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat khususnya dalam konteks mengatasi konflik yang disebabkan oleh geng di Haiti.

2. Untuk menganalisis kepentingan Amerika Serikat dalam melindungi para rakyatnya dalam ancaman imigran ilegal.

1.4 Cakupan penelitian

Jangkauan penelitian ini difokuskan pada implementasi *Global Fragility Act* (GFA) Amerika Serikat di Haiti selama Periode 2019-2025. Tahun 2019 dipilih karena tahun pertama pengesahan GFA sebagai kerangka kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengintegrasikan instrumen, pembangunan, diplomasi, dan keamanan melalui pendekatan *Whole of Government Approach*. 2025 dipilih karena menjadi periode yang menunjukkan hasil implementasi GFA, sekaligus menjadi titik awal krisis keamanan di Haiti mencapai puncak, serta dampak restrukturisasi USAID, yang menjadi tantangan utama, berjalan dari hal tersebut rentang waktu 2019-2025 dipilih.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan berfokus pada upaya pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi konflik geng di Haiti melalui Implementasi *Global Fragility Act* (GFA). kebijakan ini dirancang sebagai pendekatan Preventif untuk menangani negara-negara rentan yang menghadapi konflik berkepanjangan, termasuk Haiti yang mengalami eskalasi konflik geng, lemahnya kapasitas pemerintahan Haiti menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan GFA.

Artikel *Haiti as Empire's Laboratory* (2023) karya Jemima Pierre menjelaskan bahwa keterlibatan Amerika Serikat di Haiti bukan fenomena baru. Sejak pendudukan militer Amerika Serikat pada periode 1915-1934, Haiti menjadi

ruang penerapan kebijakan luar Negeri Amerika Serikat. Pierre berpendapat bahwa intervensi tersebut lebih mencerminkan kepentingan strategis Amerika Serikat dibandingkan kepentingan masyarakat Haiti. Meskipun demikian Artikel ini lebih menitikberatkan pada analisis historis dan kritik terhadap intervensi Amerika Serikat, sehingga belum menjelaskan secara rinci bagaimana implementasi GFA dijalankan di Haiti serta sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi dalam mengatasi konflik geng kontemporer (Yayboke dkk. 2021, 2–5).

Jurnal *A Policy Maker's Guide to the Global Fragility Act* yang ditulis oleh Erol Yayboyke, Daphne McCurdy, Annie Pforzheimer dan Janina Staughn pada tahun 2021 menjelaskan tentang mekanisme implementasi GFA sebagai instrumen pencegahan konflik di negara-negara prioritas. Penulis menyoroti tujuan GFA dalam memperkuat stabilitas melalui bantuan pembangunan, dana sebesar 1,15 miliar dollar AS, tata kelola pemerintahan, serta dukungan keamanan. Namun, kajian tersebut lebih berfokus terhadap desain kebijakan dan tujuan normatif GFA dibandingkan evaluasi implementasinya di lapangan. Selain itu pembahasan mengenai Haiti masih bersifat umum dan belum menjelaskan yang muncul akibat lemahnya kapasitas negara, korupsi dan dominasi kelompok geng. Dengan demikian, penelitian ini melihat terkait kebutuhan untuk menganalisis implementasi GFA secara lebih spesifik pada Haiti (Yayboke dkk. 2021, 2–5).

Referensi ketiga yang berjudul *Towards Resilience: Aligning Humanitarian and Development Action Behind the Global Fragility Act* (2020). yang ditulis Olga Petryniak dan Jon Kurtz dari *Mercy Corps*, membahas potensi

GFA dalam menghubungkan agenda kemanusiaan, pembangunan dan perdamaian bagi negara yang mengalami kerentanan. Kajian ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar aktor dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Namun, pembahasannya masih bersifat konseptual dan tidak memberikan analisis empiris yang mendalam mengenai Haiti sebagai negara prioritas GFA. Fokus utama dalam tulisan ini lebih diarahkan pada kerangka kerja pembangunan dan kemanusiaan dibandingkan evaluasi implementasi kebijakan dalam konteks konflik geng di Haiti (Petryniak and Kurtz 2020, 2).

Berlandaskan pada ketiga literatur tersebut, ditemukan kesamaan bahwa GFA dipandang sebagai instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menangani negara-negara rentan. Namun, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dibahas. Pertama, sebagian besar dari penelitian masih menyoroti aspek historis intervensi Amerika Serikat atau desain normatif GFA, sementara analisis mengenai implementasi kebijakan di Haiti masih terbatas, kedua pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan kajian tentang implementasi GFA menggunakan perspektif *Implementing Public Policy* George C Edwards III yang menekankan terkait faktor keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik melalui *Communication, Resource, Disposition, Structure Bureaucracy*. Ketiga, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengevaluasi kontribusi GFA dalam mengatasi konflik geng di Haiti selama periode 2019-2025. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis *Global Fragility Act* di Haiti melalui pendekatan *Implementing Public Policy* untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut bisa berjalan dan berkontribusi dalam mengatasi konflik geng dan mendukung stabilitas negara.

1.6 Kerangka Pemikiran

Buku yang ditulis oleh George C Edwards III, yang berjudul tentang *Implementing Public Policy (Politics and Public Policy)*, yang ditulis pada tahun 1980. Pada awalnya dikembangkan mengkaji kebijakan domestik, namun hal ini masih relevan karena implementasi kebijakan luar negeri melibatkan proses penerjemahan tujuan kebijakan ke dalam tindakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga pelaksana kebijakan. Dengan empat variabel utama dalam menentukan faktor keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik. Seperti, *Communication, Resources, Disposition, Structure Bureaucracy*. Selain itu Edwards menjelaskan terkait perbedaan *Indirect implementation* dan *direct implementation*. Ketika sebuah kebijakan dilaksanakan secara tidak langsung oleh pemangku kebijakan dan kebijakan dilakukan secara langsung yang melibatkan aktor lain sebagai pelaksana.

Communication, variabel ini menjelaskan keberhasilan berjalannya implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh penyampaian informasi, konsistensi dan kejelasan dalam komunikasi menjadi upaya bagaimana sebuah tujuan dan pelaksanaan kebijakan bisa berjalan, dan ditransmisikan terhadap lembaga pelaksana, dengan komunikasi yang tidak konsisten bisa menimbulkan ambiguitas dan mengurangi adanya efektivitas implementasi kebijakan (Edwards 1980, 4–5).

Resources, menjadi peranan yang penting dalam berjalannya sebuah kebijakan, dengan memiliki sumber daya manusia yang terampil di bidangnya, memadai dalam bidang otoritas, fasilitas pendukung, anggaran dan personel dengan keahlian yang tepat menjadi hal yang penting, karena dengan kurangnya

fasilitas yang diberikan selama masa pelaksanaan kebijakan, membuat sebuah kebijakan tidak berjalan dengan semestinya, dalam penelitian sumber daya digunakan dalam mengkaji kapasitas Amerika Serikat dalam implementasi kebijakan melalui dukungan pendanaan, bantuan pembangunan, program stabilisasi dan pencegahan konflik di Haiti. Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan GFA (Edwards 1980, 6–10).

Disposition, sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam berjalannya sebuah implementasi kebijakan, implementator menjadi aktor penting karena menjadi penentu dan segala keputusan menjadi tanggung jawab implementator. Dengan perbedaan pendapat dan sikap yang bertentangan bisa menjadi tantangan dalam berjalannya sebuah implementasi kebijakan serta membentuk tantangan ketika ada tumpang tindih kepentingan dari lembaga organisasi, serta membentuk efek dari diposisi akibat komitmen yang berbeda, strategi penataan staf dan, insentif untuk mendahulukan kepentingan suatu negara. atau organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan (Edwards 1980, 11–15).

Structure Bureaucracy, implementator sebagai peran tertinggi dalam menjalankan kebijakan, perlu adanya kontrol terhadap lembaga ini untuk menghindari adanya kepentingan yang dapat merugikan satu pihak, *Standard Operating Procedure* sebagai pedoman dan tujuan dalam kebijakan dan *fragmentation* atau penyebaran tanggung jawab agar sebuah lembaga bisa berjalan dengan keahlian masing-masing, guna menghindari adanya tumpang tindih kepentingan yang menyebabkan pergeseran kebijakan. Dengan adanya pembentukan pengatur implementator ini membuat berbagai segala keputusan

menjadi seragam, dan menghemat waktu, dengan membentuk SOP atau Standar Operasi Prosedur (Edwards 1980, 16–20).

Melalui keempat variabel tersebut sebuah implementasi bisa berjalan secara maksimal, keempat variabel ini berjalan secara terintegrasi untuk menjelaskan pelaksanaan *Global Fragility Act* dan faktor-faktor yang menjadi dinamika efektivitas stabilitas pemerintahan Haiti dan dalam mengatasi konflik geng di Haiti.

1.7 Argumen Sementara

Sebagai upaya dari Amerika Serikat dalam mengatasi peredaran narkoba, perdagangan senjata ilegal, melalui *Global Fragility Act* dalam mengatasi konflik geng dalam periode 2019-2025 belum secara maksimal. Meski GFA dibentuk dalam memperkuat institusi negara, meningkatkan keamanan negara, mencegah konflik berkelanjutan, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. dan mengalami berbagai tantangan, Antara lain komunikasi yang tidak maksimal dari pemangku kebijakan, koordinasi antar pelaksana, keterbatasan sumber daya berupa pendanaan, kapasitas institusi lokal, dan personel, serta kompleksnya fragmentasi birokrasi yang memperlambat efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, komitmen yang dijalankan pemangku kebijakan dalam menjalankan kebijakan juga menjadi faktor terbesar mengapa implementasi kebijakan GFA belum optimal dijalankan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menerapkan metode kualitatif dengan melakukan analisis secara deskriptif, penulis melihat adanya data-data laporan, jurnal lembaga pemerintahan dan organisasi internasional yang berguna untuk penunjang penelitian sebagai jawaban dari implementasi Undang-undang *Global Fragility Act* Amerika Serikat yang menjadi upaya dalam mengatasi konflik geng di Haiti (Abdussamad, 2021, 29–30).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Amerika Serikat, terlebih kongres yang menjadi pencetus dan mengesahkan undang-undang dari GFA, dan mengontrol dari keberlanjutan undang-undang tersebut. Objek penelitian ini adalah Pemerintahan Haiti (Sieff 2020, 16).

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan artikel ilmiah, jurnal internasional bereputasi, buku akademik, laporan organisasi internasional, dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat dan Haiti. Data dikaji untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan menyeleksi sumber yang relevan dengan implementasi *Global Fragility Act* di Haiti. Data diolah dengan proses pengelompokan, seperti tujuan kebijakan, pelaksanaan program, serta hasil implementasi kebijakan, dan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori *Implementing Public Policy* (Sopiati 2024, 2–3).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan dengan proses pengumpulan data dimulai dari menyusun definisi dari implementasi GFA terkait Haiti, dan memahami dari *literature* terkait dari teori *Implementing Public Policy Edwards III* menyiapkan dukungan data dari teori tersebut untuk mengaitkan topik yang sedang dalam masa penelitian dalam implementasi GFA dalam memandang konflik geng di Haiti (Edwards 1980, 6).

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama akan menjelaskan secara umum dari definisi topik penelitian yang akan menjadi garis awal dalam menjelaskan secara keseluruhan dari konteks penelitian yang akan dibawa.

Bab kedua akan menjelaskan dari inti mekanisme undang-undang GFA secara komprehensif dan menjelaskan lebih dalam dari studi kasus dari data yang diperoleh.

Bab ketiga akan secara jelas menganalisis konsep dari *Communication*, *Disposition*, *Resource*, dan *Structure Bureaucracy* pengaplikasiannya terhadap implementasi Undang - Undang *Global Fragility Act* melalui teori *Implementing Public Policy*.

Bab keempat akan menjelaskan tentang menampilkan secara keseluruhan dari temuan penelitian dan kesimpulan. Serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

DINAMIKA IMPLEMENTASI GLOBAL FRAGILITY ACT TANTANGAN, DAN FAKTOR

Permasalahan kelompok bersenjata di Haiti menjadi polemik yang sangat berdampak bukan hanya stabilitas pemerintahan, namun terhadap keberlangsungan rakyat di Haiti, bahkan geng telah terhubung dengan jaringan perdagangan narkoba transnasional, terkhusus seperti kokain dan marijuana, target penyebaran yang menjadi fokus dari kelompok bersenjata ini selain negara di sekitar kepulauan Karibia, Amerika Serikat juga menjadi tujuan utama distribusi narkoba yang disebarkan melalui Haiti, hal ini yang membuat pemerintah Amerika Serikat membentuk kebijakan luar negeri untuk mengurangi dari peredaran narkoba dengan membentuk *Global Fragility Act*, dengan memberikan bantuan terhadap negara rentan akibat konflik, dengan pemberian bantuan dana, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan meningkatkan stabilitas negara sebagai upaya untuk mengurangi instabilitas dan ancaman keamanan yang ditimbulkan (Muggah 2023, 3–6).

Pada 2018 pemerintah Haiti mendapatkan sanksi dari pemerintah Amerika Serikat karena ditemukan kokain yang disebarkan di kawasan Florida, yang pada saat ditemukan disebarkan oleh imigran gelap Haiti, jalur yang digunakan dalam transaksi perdagangan narkoba yang paling dominan adalah Amerika Serikat, Turki, Perancis, dan Swiss. Haiti menjadi negara transit dalam melakukan ekspor narkoba, barang ini didapatkan dari Kolombia, yang menjadi produsen terbesar dari kokain di dunia, dan Haiti juga menjadi tempat pemusatan pengiriman yang nantinya didistribusikan ke berbagai negara lainnya. Selain dari narkoba,

kelompok bersenjata seperti G9 juga berbisnis di bidang persenjataan, dengan jalur perdagangan yang dilalui dari Haiti menuju Florida, yang nantinya akan didistribusikan dan diperjualbelikan secara ilegal di Amerika Serikat melalui toko ataupun diberikan terhadap keluarga atau teman yang merupakan imigran dari Haiti (Muggah 2023, 18–25).

Implementasi GFA ini belum menemukan hasil yang optimal selama periode 2019-2025, tantangan yang dihadapi pada masa implementasi GFA ini terjadi di tahun 2019-2021 yang dimana pada masa covid 19 setelah semua negara memprioritaskan penanganan permasalahan domestik, terutama Amerika Serikat. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya perhatian dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan GFA (Sieff 2020, 16).

Selain dari penjualan narkoba yang dilakukan hingga Amerika Serikat, kelompok bersenjata Haiti juga melakukan bisnis penjualan senjata api yang jalur perdagangannya melewati dari negara Dominika, yang nantinya akan dijual ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan negara di kepulauan Karibia, hal ini bisa terjadi karena selain dari pengaruh kelompok bersenjata G9 and Family Member yang menguasai jalur pengiriman di Haiti seperti bandara dan pelabuhan yang membuat proses perdagangan ilegal di Haiti sangat mudah untuk dilakukan. Pemerintah Haiti belum bisa menyelesaikan permasalahan perdagangan ini karena pengaruh dari kelompok bersenjata ini yang sangat mendominasi dan sangat diskriminatif, yang tidak segan-segan untuk membunuh para korbannya untuk melancarkan bisnis kelompok tersebut (Muggah 2023, 11–20).

Jalur perdagangan dari Dominika Republik ke Haiti merupakan jalur penting di negara Karibia untuk nantinya bisa di distribusikan hingga belahan negara seperti Amerika Serikat hingga Eropa, ada tiga jalur perdagangan penting yang berada di Haiti ada RN1 yang menjalani di kawasan utara dari *Cap Haitien* hingga *Port au Prince*, lalu ada RN2 yang menghubungkan *Port au Prince* hingga ke *Les Cayes*, di selatan Haiti, lalu RN3 yang melintang dari barat hingga ke timur *Port au Prince*. Di titik RN1, RN2, dan RN3 ini menjadi titik vital bukan hanya untuk kepentingan bisnis gang saja, namun juga untuk pemerintah Haiti, namun titik ini menjadi wilayah kekuasaan geng G9 and Family Member, area ini menjadi tempat para geng tersebut untuk mengontrol teritori wilayah, tempat perencanaan operasi penculikan, hingga upaya ekstraksi untuk mendapatkan kendaraan secara ilegal (Muggah 2023, 11–14).

Memburuknya kondisi di Haiti tidak terlepas dari tingginya tingkat korupsi, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan politik patronase yang berkembang di dalam institusi negara. Korupsi berpengaruh terhadap kapasitas pemerintahan dalam mengawasi jalur perdagangan, aktivitas ekonomi yang berpotensi oleh kelompok bersenjata. Kondisi tersebut membuat ruang bagi geng dalam mengekspansikan bisnis narkoba dan senjata ilegal. Selain itu, sejumlah oknum kelompok bisnis diduga memanfaatkan hubungan dengan pejabat pemerintahan agar mendapatkan akses terhadap fasilitas negara, seperti infrastruktur perdagangan dan pelabuhan yang kemudian digunakan sebagai upaya penyelundupan. Pengaruh dari korupsi dipelajari melalui keterkaitan dengan lemahnya negara, kolusi antara aktor ekonomi dan politik, serta

dampaknya terhadap meningkatnya aktivitas perdagangan ilegal di Haiti (Muggah 2023, 3–4).

Korupsi yang terjadi juga merambah hingga ke sektor keamanan dan hukum, hal ini membuat penyelesaian hukum dalam mengatasi permasalahan dominasi geng di Haiti semakin memburuk, karena para pemimpin geng berusaha bukan hanya berusaha dalam bidang pemerintahan, bahkan hingga ke sektor penegak hukum dan keamanan, yang seharusnya bisa menjadi upaya terakhir dalam mengatasi dominasi geng di Haiti, tercatat dalam upaya investigasi anti korupsi unit Haiti ditemukan kasus penggelapan dan penyalahgunaan dana, namun ketika para pelaku ditangkap hanya diberikan sanksi yang tidak berat, dan selama unit tersebut berdiri hanya sekali saja kasus korupsi bisa terselesaikan yaitu di tahun 2022 terkait korupsi di pemerintahan (Muggah 2023, 6–7).

2.1 Intervensi Amerika Serikat dan Akar Konflik Geng di Haiti

Sebelum masuknya *Global Fragility Act* yang dibentuk pada tahun 2019, Amerika Serikat telah melakukan intervensi di Haiti pada periode 1915-1934. Intervensi tersebut bertujuan membatasi pengaruh negara-negara Eropa, khususnya Perancis, Jerman, di kawasan Karibia. Amerika Serikat membentuk (*Military Occupation*), yang ditujukan untuk melindungi warga Amerika Serikat dan perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Haiti akibat meningkatnya ketegangan dan perlawanan masyarakat terhadap keberadaan pengaruh asing Amerika Serikat di Haiti (Angulo 2011, 1–3).

Haiti juga mengalami pendudukan dari militer Amerika Serikat, pendudukan tersebut pertama kali terjadi pada tahun 1915-1934, datangnya Amerika Serikat di Haiti pada awalnya bertujuan untuk memberikan keamanan

kemanusiaan dan berusaha menjaga stabilitas Haiti, selain alasan tersebut adalah karena kepentingan dari petinggi City Bank yang ingin melakukan ekspansi perekonomian hingga ke kawasan Karibia, dan setelah kejadian tersebut dan para petinggi militer Amerika Serikat diberikan keyakinan bahwa intervensinya di Haiti akan aman tanpa adanya kendali jika terjadi permasalahan ekonomi (Angulo 2011, 3–5).

Dengan adanya kebijakan Amerika Serikat yang dinilai hanya memberikan keuntungan bagi warga Amerika Serikat saja, dan hanya menjadi penjajahan lanjutan dari Perancis, dan Amerika Serikat juga mengorientasikan Haiti sebagai negara yang lemah dan rapuh (*Fragile State*), dan tidak berpendidikan membuat Haiti kehilangan legitimasi dari rakyatnya, akibat tidak bisa mengatasi permasalahan pemulihan pemerintahan pasca kolonialisme, dan hanya bisa bergantung pada kekuatan eksternal yang juga tidak bisa membantu secara eksplisit mengenai permasalahan, yang membuat terbentuknya kelompok bersenjata yang menentang adanya pemerintahan pro terhadap bantuan eksternal, yang akhirnya berusaha untuk menggulingkan pemerintahan, tercatat seperti di tahun 2021 Jovenel Moïse yang dibunuh oleh kelompok bersenjata, selain dari upaya penggulingan pemimpin di Haiti para geng ini juga mengincar kekuasaan mereka dengan menjual berbagai obat-obatan terlarang, yang bukan hanya didistribusikan di Haiti, namun juga hingga ke luar kawasan Karibia, hingga ke kawasan Amerika (Angulo 2011, 1–3).

Keberhasilan kelompok bersenjata dalam upaya penggulingan pemimpin Haiti ini berhasil dilaksanakan, tidak terlepas dari anggota geng yang dimiliki. Kelompok bersenjata rata-rata berasal dari mantan tentara angkatan darat Haiti

yang sempat dibubarkan pada tahun 1997, yang membuat para anggota ini mampu menggulingkan pemimpin Haiti dengan cara taktis dan presisi, karena para anggota tersebut rata-rata sudah paham dengan kondisi dan celah yang berada di kawasan Haiti, para pemimpin militer geng bersenjata Haiti yang berasal dari mantan anggota militer hanya terbagi dalam sedikit orang saja, karena desakan politik dan banyak dari mantan anggota militer yang pergi keluar dari Haiti untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau memilih untuk membentuk kelompok bersenjata mereka, hal yang menyedihkan dari pembentukan geng ini adalah banyak dari anggota yang masih dibawah umur, dengan harapan mendapatkan finansial yang lebih baik dari sebelumnya (Kolbe 2013, 3–5).

2.1.1 Tujuan Global Fragility Act Dalam Mengatasi Konflik Negara Rentan

Tujuan utama *Global Fragility Act* adalah mencegah konflik, memperkuat stabilitas negara rentan, serta mengurangi ancaman keamanan yang berdampak pada kepentingan Amerika Serikat. Untuk mencapai tujuan tersebut, *Global Fragility Act* menggunakan metode bantuan keuangan terhadap pemerintah yang sedang mengalami konflik, lalu juga memberikan pendidikan bagi kepolisian nasional Haiti, untuk menghindari adanya konflik yang berkepanjangan akibat dominasi geng dengan masa implementasi selama lima tahun (Yayboke dkk. 2021, 1–2).

Upaya bantuan ini juga didukung oleh berbagai lembaga pemerintahan Amerika Serikat, untuk meyakinkan bahwa kebijakan luar negeri ini dapat berjalan dengan sukses, seperti Kongres Amerika Serikat, USAID, dll, hal ini yang disebut dengan *Whole of Government Approach*, yang dimana semua lembaga internal maupun eksternal membantu untuk mensukseskan kebijakan luar

negeri GFA *Global Fragility Act* (Stepputat dan Greenwood 2013, 6).

Dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintahan Amerika Serikat bisa menjadi evaluasi dari konflik yang sebelumnya terjadi, seperti di Afghanistan, yang banyak mengorbankan bukan hanya sumber daya manusia dan juga keuangan, yang membuat Amerika Serikat menerima kerugian, yang menjadi evaluasi besar besaran bagi militer Amerika Serikat, dengan *Global Fragility Act* dan menggunakan pendekatan *Whole of Approachment Government* (WoGA) dalam GFA sebagai bentuk evaluasi kebijakan intervensi yang gagal sebelumnya, sehingga implementasi kebijakan tidak bergantung pada instrumen militer, tetapi melibatkan lembaga pembangunan dan sipil dalam meningkatkan pencegahan konflik (Stepputat dan Greenwood 2013, 7).

Merespon kebijakan Amerika Serikat yang cenderung mengarah terhadap kebijakan intervensi militer dan kebijakan yang reaktif membuat Amerika Serikat mengubah arah kebijakannya. Dengan membentuk kebijakan yang mengarah bantuan, untuk mengatasi negara rentan dan konflik, yang salah satu perumusan bantuan tersebut adalah terbentuknya *Global Fragility Act*, yang dikembangkan pada masa Joe Biden dalam membantu negara yang mengalami konflik berkelanjutan. Oleh sebab itu, kebijakan GFA bisa menjadi jawaban dari permasalahan Amerika Serikat yang kebijakan sebelumnya berarah terhadap intervensi militer dan kebijakan reaktif (Stepputat dan Greenwood 2013, 2-10).

2.2 Bentuk Implementasi Global Fragility Act (GFA) di Haiti (2019-2025)

Global Fragility Act (GFA) merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang memiliki empat poin utama dalam kebijakannya, *Prevention*, *Stabilization*, *Partnership*, dan *Management*. Empat poin tersebut bertujuan untuk

mencegah konflik dan memperkuat stabilitas di negara yang mengalami kerentanan. Kebijakan ini digunakan untuk alat intervensi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang mampu mengatasi konflik yang bersumber dari negara yang mengalami kondisi ekonomi yang rentan, lemahnya legitimasi negara serta dominasi organisasi bersenjata yang mengancam keamanan (Yayboke dkk. 2021, 1–3).

Ada empat point yang menjadi fokus utama dalam implementasi *Global Fragility Act* yang pertama adalah:

1. *Prevention*: upaya preventif dari pemerintah Amerika Serikat bersama Haiti untuk bisa mengatasi dan mengendalikan konflik untuk semakin meluas
2. *Stabilization*: stabilisasi, menjadi metode yang dilakukan untuk meredakan konflik dan mendorong untuk para kelompok bisa menjadi termarjinalkan.
3. *Partnership*: melakukan kerjasama dengan para organisasi regional/Internasional untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada dan menciptakan lingkungan yang stabil di lingkungan yang rentan
4. *Management*: capaian ini ditujukan untuk menjadi bukti nyata bahwa upaya dari pemerintah Amerika Serikat untuk menampilkan bahwa pajak yang setiap tahunnya dibayarkan oleh warga Amerika Serikat digunakan untuk hal yang sesuai, dan untuk memajukan negara mereka (The Borgen Project 2024).

Bantuan seperti dana sebesar 1,15 miliar Dollar AS selama lima tahun, bantuan pendidikan untuk militer, pembangunan pemerintahan ini menjadi

bantuan yang saat ini diberikan oleh Amerika Serikat, hal ini ditujukan untuk mengembalikan kembali legitimasi negara Haiti yang sejak 1991 dan 2004 silam mengalami ketidakstabilan akibat kudeta oleh kelompok bersenjata di Haiti, diikuti dengan tahun 2021 adanya pembunuhan oleh presiden Haiti Jovenel Moïse, yang membuat eksistensi dari kelompok bersenjata G9 and Family Member sebagai kelompok yang paling berkuasa di *Port au De Prince* dan Haiti makin ditakuti (Yayboke dkk. 2021, 3–5).

Pemerintah Haiti telah lama berupaya mengatasi dominasi dari kelompok bersenjata G9, namun konflik tersebut belum terselesaikan akibat ketidakstabilan politik dan semakin kuatnya eksistensi kelompok bersenjata. hal ini diperkuat dengan banyak pemimpin dari anggota G9 ini merupakan mantan anggota militer darat Haiti yang sempat dibubarkan pada tahun 1997, sehingga operasi kelompok berjalan secara terstruktur dalam jaringan perdagangan narkoba. Selain itu beberapa aktor politik memanfaatkan geng untuk alat dalam mengintimidasi lawan dalam memenangkan pemilu situasi ini memperburuk keamanan di Haiti (Kolbe 2013, 3–5).

Semakin buruknya kejadian yang terjadi akibat dominasi kelompok bersenjata di Haiti ini membuat pemerintah Haiti sudah membuka bagi seluruh negara ataupun meminta bantuan dari organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk membantu Haiti dari mengatasi permasalahan geng, dengan masuknya Amerika Serikat melalui *Global Fragility Act* untuk dana bantuan dan PBB dengan menurunkan pasukan perdamaian mereka yang dipimpin oleh Kenya, operasi ini dilakukan di tahun 2023-2025 yang disebut dengan (*Multinational Security Support*) yang membuat di tahun tersebut

dominasi kelompok bersenjata tersebut terkait kekerasan dan pembunuhan menjadi berkurang eskalasinya (United Nations 2023).

2.2.1 Pergeseran Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Global Fragility Act

Dalam implementasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering melakukan pergeseran kebijakan, yang ditujukan untuk kepentingan tersendiri Amerika Serikat. Pergeseran ini pada akhirnya dapat merugikan negara lain, menimbulkan konflik yang berkelanjutan, atau bahkan yang terburuk adalah invasi untuk memenuhi kepentingan negara. Hal ini berdampak pada geopolitik antar negara. Pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang paling berdampak pada persepsi internasional adalah intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Iraq pada tahun 2003 (Fukuyama 2014, 50–80).

Pada tahun 2003 Iraq dianggap memiliki senjata pemusnah massal, yang ditakutkan akan mengancam keamanan Amerika Serikat pada waktu tersebut. Akan tetapi, tuduhan tersebut terbukti tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan. Namun Amerika Serikat pada kejadian tersebut mengambil berbagai sumber daya alam dan harta seperti minyak, emas batangan dan uang yang ditemukan di kediaman Saddam Hussein, yang menjadi pemimpin Irak pada saat itu. Dalih tersebut membuat kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dianggap bukan untuk kepentingan banyak negara, namun untuk kepentingan domestik Amerika Serikat (Fukuyama 2014, 59–86).

Kepentingan *Global Fragility Act* ini diikuti dengan upaya Amerika Serikat untuk memberikan keamanan bagi rakyat Amerika Serikat menghindari

adanya pengaruh buruk dari imigran yang ditakutkan untuk menyebarkan narkoba di kawasan Amerika Serikat. Adanya pergeseran kebijakan ini menunjukkan Amerika Serikat dalam membentuk kebijakan luar negeri bukan untuk memberikan jawaban untuk mengatasi konflik, namun untuk memenuhi kepentingan dalam negeri, dan untuk warga Amerika Serikat (Fukuyama 2014, 37–58).

Eksistensi dari negara rentan yaitu Haiti, menjadi sarana untuk negara yang besar, untuk memperlakukan negara-negara lemah yang berada di ambang kehancuran untuk menjadi “kelinci percobaan” atau alat kepentingan negara untuk mencapai tujuan, dan hal ini bisa menjadi ancaman bagi negara yang menjadi objek kebijakan, karena ancaman yang dihadapi paling buruknya adalah menjadi *Fragile States* atau negara yang rentan, keadaan ini yang sekarang dihadapi oleh Haiti, karena tidak adanya pilar konstitusi yang bisa mengatasi dari permasalahan konflik geng yang terjadi di Haiti, dan negara yang mengintervensi seperti Amerika Serikat seharusnya tidak bisa sewenang-wenang untuk bisa mengontrol birokrasi pemerintahan, yang hal itu mengarah terhadap Amerika Serikat untuk mengatur segala urusan dalam negeri Haiti, dan dengan Haiti membuka bantuan secara terbuka kepada negara-negara lain untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada, sama saja dengan memberikan kembali kedaulatan negara kepada pihak yang lain, yaitu Amerika Serikat (Fukuyama 2014, 109–20).

2.2.2 Kolaborasi Amerika Serikat dan Organisasi Internasional Dalam Implementasi GFA Haiti

Implementasi *Global Fragility Act* dalam implementasinya, tidak hanya melibatkan lembaga pemerintahan seperti USAID, Kongres, organisasi internasional juga berperan, Amerika Serikat memberikan kesempatan untuk bisa membantu kebijakan tersebut, Amerika Serikat mencari seperti organisasi regional seperti:

1. *Caribbean Community* (CARICOM) yang membantu dalam mengatasi permasalahan dan menjadi mediator dalam mengatasi konflik geng di Haiti (Campbell 2020, 1–4)
2. *International Monetary Fund* IMF sebagai organisasi yang memastikan agar tidak terjadi krisis yang ekonomi, dan memberikan bantuan dana jika Haiti membutuhkan (Campbell 2020, 1–5)
3. PBB atau Persatuan Bangsa Bangsa yang turut membantu untuk mengatasi konflik secara langsung melalui program *Multinational Security Support*, yang dipimpin oleh pasukan militer Kenya (Campbell 2020, 1–3).

Peran dari organisasi internasional sangat krusial dalam memastikan negara prioritas GFA bisa terhindari dari krisis, stabilitas dan upaya pencegahan konflik bisa berjalan secara maksimal. Dengan banyaknya pihak yang terlibat untuk mensukseskan dari kebijakan luar negeri ini menjadi menambah kekuatan untuk Amerika Serikat dalam membantu Haiti dalam mengatasi konflik geng. Bersama dengan organisasi regional di Haiti harus memastikan bahwa ada upaya penyelesaian dari konflik geng, dan memastikan pembangunan pemerintahan,

seperti infrastruktur di dalam pemerintahan, atau infrastruktur umum di Haiti harus berjalan dengan semestinya (Zuroski 2022, 1–3).

BAB III
***GLOBAL FRAGILITY ACT* DALAM TINJAUAN**
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK LUAR NEGERI AMERIKA
SERIKAT DI HAITI

Pada bab ini penulis akan menguraikan implementasi kebijakan *Global Fragility Act* dari sudut pandang *Implementing Public Policy*, dari George C Edwards III, yang menjelaskan tentang indikator seperti *Communication*, *Disposition*, *Resource*, dan *Bureaucracy Structure*. George menjelaskan bahwa keberhasilan dan juga kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan bisa dilihat dari kualitas kebijakan yang dibuat (Edwards 1980, 9–11).

Communication, variabel tersebut berperan penting dalam penyampaian kebijakan, dan harus sesuai dengan apa yang disampaikan dari perumus kebijakan terhadap pelaksana kebijakan di lapangan yaitu USAID dan objek dari implementasi kebijakan yaitu pemerintah Haiti, lalu *Disposition* sikap atau komitmen pelaksana kebijakan, dengan banyaknya sumber daya dan komunikasi yang baik jika tidak adanya komitmen, hal ini dinilai akan sia-sia. *Resource* dengan upaya kebijakan yang dinilai sangat membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit membuat komitmen dari sebuah negara yang melakukan kebijakan bantuan luar negeri ini perlu dipertimbangkan. Lalu yang terakhir *Bureaucracy Structure*, untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan lancar, perlu adanya struktur birokrasi yang mengontrol semua pendistribusian segala bentuk bantuan yang diberikan, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan (Edwards 1980, 9–14).

3.1 Communication Sebagai Instrumen Krusial Dalam Pendekatan Kebijakan

Dalam implementasi *Global Fragility Act* (GFA), komunikasi merupakan faktor krusial untuk memastikan tujuan awal kebijakan, yaitu penguatan stabilitas, pembangunan institusi berkelanjutan, dan pencegahan konflik bisa tercapai. Bentuk komunikasi yang dilakukan dengan lembaga pemerintahan Amerika Serikat, dan pemerintah Haiti, dengan menggunakan prinsip *Whole of Government Approach*, untuk mendukung koordinasi GFA, selain itu diatur melalui *Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability* sebagai pedoman lembaga dalam pelaksanaan GFA (U.S Department of State, 2024, 15–20).

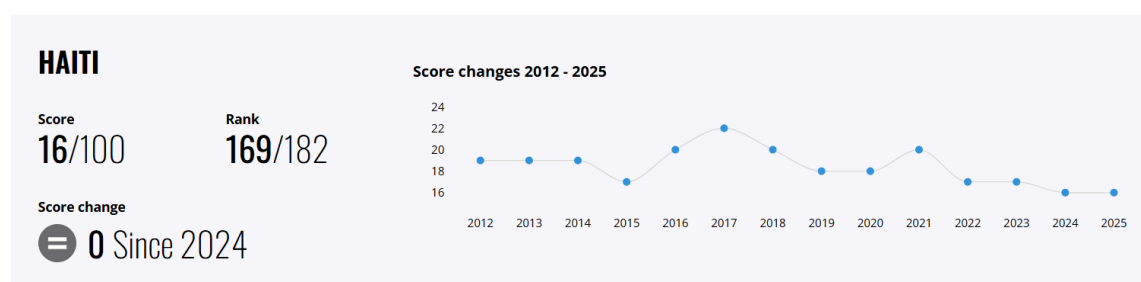
Dalam implementasi GFA Joe Biden bersama lembaga pemerintahan seperti *National Security Council* (NSC), *Department of Defence* (DoD), USAID, untuk mengarahkan tujuan serta pelaksanaan kebijakan, dengan menetapkan negara Haiti mendapatkan perpanjangan waktu implementasi GFA menjadi 10 tahun, yang sebelumnya hanya mendapatkan masa percobaan kebijakan selama 5 tahun pada 2019 dan ditetapkan perpanjangan hingga tahun 2032 (U.S Department of State, 2024, 38–40).

Sebelum penetapannya, pemerintah Amerika Serikat melakukan observasi pada masa percobaan pada tahun pertama implementasi GFA pada 2019, untuk menilai efektivitas kebijakan dan menilai perkembangan melalui proses *Working Integracy Group* yang melibatkan pemerintah Haiti, diaspora Haiti (United States Department of State, 2024, 3–6).

Mekanisme yang dilakukan dalam komunikasi GFA yang telah dirancang secara terstruktur dilakukan dengan cara *Steering Committee*, koordinasi di tingkat lapangan, dan sekretariat lapangan, yang masih menemukan tantangan. Seperti tumpang tindih kepentingan, selain itu kompleksnya birokrasi yang membuat hambatan dan keterbatasan bahasa mempengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan, yang menciptakan *policy slippage* atau pergeseran kebijakan yang berbeda dari tujuan awal penetapan GFA. Oleh karena itu, dengan komunikasi yang jelas, konsistensi, dan kejelasan dalam menginstruksikan kebijakan menjadi prasyarat penting dalam keberhasilan implementasi GFA di Haiti (U.S Department of State, 2024, 20–23).

Permasalahan komunikasi dalam implementasi kebijakan juga diperparah oleh rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan Haiti. Ditunjukkan dengan tingginya tingkat korupsi di dalam sektor publik Haiti dalam data (Transparency International 2024).

Gambar 3.1 *Corruption Perception Index* dalam Pemerintahan Haiti



Dalam *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2024 menunjukkan skor 16 ke 100, karena skala CPI bergerak dari 0 yaitu “sangat korup” hingga ke 100 “sangat bersih”, terkait persepsi publik terkait korupsi yang terjadi dalam sektor pemerintahan Haiti, data tersebut menunjukkan stagnasi pada level korupsi yang

tinggi, Haiti mendapatkan rank 169/182 dari negara yang mengalami tingkat korupsi yang tinggi dalam Pemerintahan. Kondisi korupsi dalam pemerintahan ini menyebabkan koordinasi antar lembaga terhambat, dominasi isu korupsi ini dapat menghalangi dari proses *agenda setting*, *framing* dan *priming*, yang dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan di mata publik (Campbell 2020, 6–7).

3.1.1 *Transmission Instruksi Komunikasi Kebijakan GFA*

Transmission atau penyampaian instruksi merupakan proses penyaluran perintah kebijakan dari pembuat kebijakan terhadap pelaksana di lapangan. Dalam *Global Fragility Act* instruksi kebijakan berasal dari presiden Amerika Serikat, kongres, *National Security Council*, dan *Department of State* yang kemudian dilanjutkan oleh USAID, organisasi internasional, serta mitra pemerintah Haiti sebagai pelaksana program *Global Fragility Act*. agar tujuan kebijakan dapat tercapai, setiap instruksi harus dipahami secara konsisten meliputi pelaksana sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan program, dalam *Global Fragility Act* proses penyampaian kebijakan dilakukan dengan mekanisme *Government to Government* (G2G). Instruksi yang diberikan pemerintah Amerika Serikat disalurkan melalui *National Security Council*, *Department of State*, dan USAID terhadap pemerintah Haiti melalui *Integracy Working Group* yang dikonsultasikan dengan diaspora Haiti, organisasi masyarakat sipil, melalui forum tersebut arahan kebijakan serta evaluasi program bisa tersampaikan pada pelaksana tingkat pemerintahan yaitu dengan mengumpulkan lembaga pemerintahan Amerika Serikat dan Haiti, selain konsultasi rutin dengan para *Civil Society*, diaspora dan mitra kebijakan GFA mengenai pengumpulan data, adaptasi

strategi, selain melakukan *working group*, dilakukan juga sinkronisasi *Integrated Country Strategy* oleh USAID, dengan fokus terhadap warga sipil, dan keamanan para warganya (U.S Department of State, 2024, 20–22).

Proses penyampaian kebijakan meskipun berjalan tidak optimal, melalui pendekatan *Whole of Government Approach* kebijakan GFA sering kali menyebabkan informasi harus melewati berbagai lapisan lembaga kepada pelaksana lapangan., dengan keterlambatan penyampaian instruksi, akan terbentuk perbedaan interpretasi antar lembaga, ketidaksesuaian kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan pelaksana kebijakan di Haiti. Dalam mengurangi permasalahan perbedaan interpretasi, pemerintah Amerika Serikat melakukan *Integracy Working Group*, agar tujuan dan pembaharuan strategi bisa sesuai dengan tujuan awal GFA (U.S Department of State, 2024, 30–32).

Kejelasan penyampaian prioritas kebijakan juga dilihat dari keputusan pemerintah Amerika Serikat dalam menentukan Haiti sebagai negara prioritas dalam implementasi GFA periode 2022-2032. Penyebab lain dari penetapan Haiti akibat konflik geng adalah perdagangan narkoba yang dibawa oleh diaspora Haiti menuju Amerika Serikat, yaitu Florida menimbulkan kekhawatiran bagi keselamatan para warga Amerika Serikat, selain itu sumber senjata yang didapatkan dari para geng seperti G9 ini didapatkan dari Amerika Serikat, yang dibawa oleh para diaspora yang berasal dari Haiti, dan menggunakan jalur perdagangan yang sudah diatur oleh geng tersebut agar mudah untuk sampai ke Haiti. Fenomena yang membuat Joe Biden menetapkan Haiti sebagai prioritas utama GFA untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi konflik (Muggah 2023, 31–32).

3.1.2 Consistency Dalam Penetapan Implementasi Kebijakan GFA

Consistency atau ketetapan dalam komunikasi dan implementasi juga perlu ditekankan dalam penetapan kebijakan, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan seragam dan konsisten, dan perintah yang harus diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan antar lembaga ataupun hal yang membingungkan, dan akhirnya memperlambat dari kinerja kebijakan. Tantangan yang dihadapi ketika implementasi kebijakan dampak nyata dari inkonsisten ini adalah diskresi atau *Slippage*, kebebasan bertindak atau diskresi ini dapat disalahgunakan bagi para pelaksana untuk memenuhi kepentingan, yang akhirnya membuat instruksi yang dilakukan oleh implementor tidak sesuai atau pergeseran kebijakan akibat inkonsistensi, tidak konsisten ini menambah permasalahan dan pertanyaan dari keberhasilan dari intervensi Amerika Serikat dalam membantu negara lain yang mengalami kerentanan yang dinilai dapat mempengaruhi kedaulatan Amerika Serikat (Angelo and Gevarter 2021).

Global Fragility Act dibentuk sebagai upaya menangani konflik, dan berfokus pada pembangunan institusi, namun permasalahan terjadi di tahun 2025. Geng *Viv Ansanm* melakukan penyerangan di ibu kota *Port au de Prince*, kerusakan dilatarbelakangi oleh teror dari kelompok bersenjata akibat bantuan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menurunkan bantuan militer dan bantuan kemanusiaan yang bertepatan dengan program *Multinational Security Support* (MSS) dengan Amerika Serikat. Kota *Port au de Prince* mengalami kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Menanggapi teror tersebut Amerika Serikat mengubah prioritas bantuannya, yang pada awalnya

berfokus pada pembangunan institusi, namun dengan perusakan dan teror yang ada di kota tersebut membuat prioritas Amerika Serikat berfokus pada program MSS, dan membuat bantuan pembangunan institusi terhenti. Karena program MSS secara langsung untuk mengatasi konflik melalui bantuan militer Kenya yang bekerja sama dengan PBB (Coto, 2025).

Dengan tidak konsistennya kebijakan *Global Fragility Act* (GFA) yang pada awalnya memfokuskan pada bantuan pembangunan institusi, yang akhirnya di 2025 dengan teror dilakukan oleh kelompok bersenjata dengan menghancurkan infrastruktur, membuat pemerintah Amerika Serikat merespon dengan memfokuskan pada program kerjasama GFA dengan PBB melalui *Multinational Security Support* (MSS). Karena program MSS secara langsung untuk mengatasi konflik, permasalahan ini yang membentuk inkonsistensi dalam implementasi kebijakan (Coto, 2025).

3.1.3 Clarity sebagai Instrumen Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan GFA

Clarity atau kejelasan juga menjadi instrumen dalam mendukung berjalannya kebijakan, dengan adanya arahan yang jelas dari para pencetus kebijakan dalam mengarahkan dan membentuk kebijakan agar tidak menimbulkan ambiguitas menjadi hal yang perlu disoroti, dengan adanya undang-undang yang jelas dan tidak samar menjadi faktor penting dalam efektifnya kebijakan ketika dijalankan. *Vague Laws* atau ketidakjelasan hukum menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh perumus kebijakan, dengan adanya ambiguitas dalam undang-undang yang mengatur kebijakan tersebut, membentuk satu permasalahan

yaitu *leeway* atau ruang gerak yang cukup besar untuk memberikan makna tersendiri, yang ditakutkan menjadi upaya pribadi dalam menjalankan kepentingannya tersendiri, hal ini menjadi hal yang berbahaya, karena menjadi pergeseran kebijakan atau *slippage* yang menyimpang dan bertentangan dengan intensi asli dari para pembuat kebijakan. Penyebab ketidakjelasan ini berakar dari banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi GFA melalui pendekatan *Whole of Government Approach*. Keterlibatan lembaga pemerintahan Amerika Serikat dan mitra internasional memerlukan pedoman serta instruksi yang konsisten agar memastikan pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang sama terkait prioritas kebijakan dan pedoman kebijakan (Edwards 1980, 27–31).

Dalam implementasi kebijakan, lembaga pemerintahan memiliki peran penting dalam menginstruksikan kebijakannya dengan jelas, dalam *Global Fragility Act* (GFA) lembaga pemerintahan seperti *National Security Council* (NSC) memiliki peran dalam membantu merumuskan strategi keamanan dalam memberikan upaya preventif dalam mengatasi konflik geng, memberikan usulan pendidikan bagi kepolisian Haiti dalam mengatasi ketika terjadi konflik di Haiti, perumusan ini juga berdasarkan dari perintah presiden Amerika Serikat, dan dari rumusan kebijakan tersebut dilanjutkan terhadap *Department of State* (DoS) yang mengatur strategi luar negeri agar kebijakan GFA berjalan sesuai tujuan utama. USAID yang mengatur terkait bantuan pembangunan, dan pendistribusian dana dari GFA, setelah adanya perumusan ini dilanjutkan pada Kongres dan diberikan instruksi kebijakannya terhadap pemerintah Haiti, organisasi internasional dan mitra GFA (Yayboke dkk. 2021, 3–4).

Pada masa implementasinya kejelasan instruksi ini terdapat permasalahan, yaitu permohonan bantuan akibat konflik di kota *Port au de Prince* oleh geng Gran Grif pada Oktober 2025, bantuan tersebut diajukan oleh lembaga penegak hukum Haiti karena konflik yang terjadi berjalan sangat cepat, yang menimbulkan 70 korban jiwa, namun karena kompleksnya birokrasi yang harus dihadapi karena meliputi berbagai lapisan dan harus disetujui oleh semua lembaga pemerintahan Amerika Serikat, yang pada akhirnya kejadian tersebut tidak adanya bantuan dan berakhir pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur (Coto, 2025).

Dengan lapisan birokrasi kebijakan GFA yang permohonannya harus disetujui oleh lembaga pemerintahan Amerika Serikat membuat implementor lapangan mengalami kebingungan dalam menjalankan kebijakannya, hal ini menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan *Global Fragility Act* di Haiti (Coto, 2025).

Kurangnya kejelasan tujuan kebijakan dan indikator keberhasilan juga dapat menimbulkan kondisi *Management by Activity*, yaitu ketika pelaksana kebijakan lebih berfokus pada banyaknya aktivitas yang dilakukan daripada pencapaian tujuan kebijakan yang sebenarnya. Dalam instrumen *Clarity* atau kejelasan instruksi perlu diimbangi dengan fleksibilitas pelaksanaan, di satu sisi, instruksi yang ambigu dapat menimbulkan kegagalan implementasi, tetapi di sisi lain instruksi yang terlalu kaku dapat membatasi kemampuan pelaksana kebijakan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Perlu adanya kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan di lapangan karena *Global Fragility Act* mengembangkan *strategic Monitoring, Evaluation, and Learning* (MEL) untuk mendorong *learning* dan *adaptation* dalam kasus Haiti, pelaksana

harus memberikan bukti baru dan adaptasi bila diperlukan, dengan penyesuaian strategi tersebut pelaksana kebijakan diwajibkan menggunakan temuan baru yang terjadi pada perubahan kondisi di lapangan, karena sebuah kebijakan ini terlebih dengan masa yang cukup panjang terlebih GFA dengan proyeksi 10 tahun perlu adanya proses adaptasi yang panjang, untuk memastikan lancarnya sebuah kebijakan (U.S Department of State, 2024).

Dengan adanya penerapan fleksibilitas pelaksana kebijakan diberikan ruang dalam menyesuaikan metode pelaksanaan dengan kondisi yang dihadapi di Haiti, tanpa mengubah arah kebijakan. Implementasi GFA melalui *Whole of Government Approach* perlu diberikan fleksibilitas agar pelaksana dapat menyesuaikan pelaksanaan sesuai dengan kewenangannya. Serta kejelasan kebijakan bisa terjaga guna menghindari ambiguitas dan membantu pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan (Stepputat dan Greenwood 2013, 13–14).

3.2 Resources sebagai faktor pendorong dari *Global Fragility Act*

Selain komunikasi, sumber daya juga menjadi kerangka penting untuk memahami berjalannya sebuah kebijakan publik. Sumber daya juga menjadi faktor penentu keberhasilan dan konsistensi dari perintah kebijakan yang telah dikomunikasikan dan dapat terealisasi sesuai dengan objek kebijakan. Dalam komponen utama dalam kebijakan, sumber daya seperti informasi yang dibutuhkan tentang cara melaksanakan kebijakan, teknis berjalannya penyaluran bantuan, dan data yang diperlukan untuk keberlangsungan implementasi kebijakan, serta pengumpulan data untuk mengenai kepatuhan untuk pihak yang

terlibat dalam kebijakan GFA, seperti *Non Governmental Organization* (NGO) dan organisasi internasional. Serta dalam pemenuhan terkait sumber daya yang harus dipenuhi dalam kebijakan seperti, peralatan yang menunjang seperti bahan yang berguna untuk pembangunan, lahan untuk dijadikan pusat untuk koordinasi bagi lembaga pemerintah Amerika Serikat dan pengumpulan data sebagai penunjang kebijakan GFA (Edwards 1980, 66–67).

Tantangan yang diterima dalam implementasi GFA, terlebih dalam sumber daya yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam membantu mengamankan perbatasan dari masuknya diaspora Haiti, yang berusaha untuk mengirim narkoba senjata dari Haiti menuju Amerika Serikat, atau dari Amerika Serikat menuju Haiti, tercatat luas dari perbatasan darat Haiti sepanjang 392 km namun, petugas perbatasan (POLIFRONT) *the Haiti National Border Police* yang tersedia hanya sekitar 294 petugas saja, dan petugas penjaga pantai perbatasan *Haitian Coast Guard* yang hanya berisikan 181 petugas, hal ini membuat lemahnya penjaga perbatasan Haiti, yang dimana jalur perbatasan ini menjadi hal yang krusial bagi keluar masuknya pengedar narkoba dan senjata, yang seharusnya pengamanan ini menjadi ujung tombak dari keamanan Haiti, namun pemerintah Haiti masih belum bisa mengatasi ketimpangan sumber daya. Selain kekurangan dari jumlah staf, keterbatasan sarana pendukung juga mempengaruhi dari keberhasilan GFA di Haiti, keterbatasan sarana pendukung ini seperti gedung bagi unit khusus penegak hukum Haiti, perlengkapan patroli, persenjataan, dampak nyata yang dihadapi dalam keterbatasan sarana pendukung ini memperlambat dari implementasi kebijakan GFA (Muggah 2023, 6–9).

3.2.1 Staff Pendukung Sumber Daya Kebijakan GFA

Personel menjadi variabel yang mendukung dari sumber daya implementasi kebijakan publik, dengan penerapan personel yang tepat dengan keahlian yang sesuai, dan kuantitas personel yang bertanggung jawab bisa meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan, selain kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan dengan tujuan efektif. Oleh karena itu dengan kekurangan tenaga yang kompeten dan memadai dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan, meskipun dengan sumber daya dan finansial yang tersedia (United Nations 2023, 2-3).

Dalam laporan UNODC tahun 2023, keterbatasan staf ini terjadi dalam lingkup lembaga penegak hukum Haiti, tercatat Haiti memiliki 1.771 km garis pantai, namun unit penjaga perbatasan pantai (POLIFRONT) hanya memiliki satu kapal operasional yang masih berfungsi dan personel per 2023 sebanyak 294. Dengan perbatasan darat Haiti sepanjang 392 km. Keterbatasan sumber daya ini menjelaskan bahwa tantangan utama keberhasilan dari implementasi kebijakan bisa dianalisis melalui kesediaan sumber daya yang diberikan dan ditemukan ketersediaan sumber daya ini masih jauh dari kata cukup dalam mendukung proses implementasi, dengan ditemukannya keterbatasan staf, sarana pendukung, dan sumber daya fisik seperti kapal, dan alat pindai, menjelaskan faktor penghambat dari keberhasilan kebijakan (Muggah 2023, 7–8).

Dalam implementasi *Global Fragility Act* didapati permasalahan selama penerapan program yang bekerja sama dengan PBB, yaitu melalui *Multinational Security Support* (MSS). Program andalan yang dirancang untuk menciptakan

keamanan internasional di Haiti, meskipun dirancang untuk stabilitas, misi ini mengalami permasalahan dukungan personel dalam mensukseskan program, dengan 1.000 personel kepolisian yang dipimpin oleh militer Kenya. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan tantangan yang dihadapi, terutama kelompok *Viv Ansanm*, sebagai salah satu kelompok geng terbesar di *Port au Prince*. Kondisi ini menunjukkan permasalahan ketidaksesuaian antara kapasitas sumber daya yang tersedia, dan ancaman keamanan yang tidak kunjung usai, sehingga implementasi kebijakan GFA tidak berjalan secara optimal (United Nations 2023, 11-12).

Selain itu, permasalahan lainnya dalam keterbatasan sumber daya yang terjadi pada USAID, pada masa Donald Trump di tahun 2025 USAID terpaksa dinonaktifkan, menurut Donald Trump lembaga yang mengatur keuangan dan pembangunan ini hanya merugikan dari anggaran tahunan Amerika Serikat, yang membuat program yang dirancang untuk memperkuat stabilitas tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga mengurangi efektivitas GFA dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pencegahan konflik yang berkelanjutan (Human Rights Watch, 2025).

3.2.2 Information Penunjang Implementasi Kebijakan GFA

Information, merupakan variabel esensial dari sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan, karena berfungsi sebagai tata cara bagi pelaksana dalam memahami kebijakan, menentukan arah dari kebijakan, dan mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau *Knowing What to Do*. Dengan ketersediaan informasi yang akurat dari pemangku kebijakan menjadi faktor

penting dari keberhasilan dalam memastikan bahwa pendistribusian sumber daya secara efektif mencapai tujuan kebijakan (Edwards 1980, 63–65).

Pada implementasi *Global Fragility Act* di Haiti, keterbatasan informasi menjadi tantangan yang dialami, terlihat melalui lemahnya sistem *Monitoring, Evaluation, and Learning* (MEL) dalam memastikan efektivitas kebijakan. menurut laporan Government Accountability Office (GAO) tahun 2023 menunjukkan program-program yang dijalankan *Department of State* dalam mendukung pengembangan *Haitian National Police* (HNP) lebih banyak menilai pengeluaran, seperti jumlah pelatihan yang diberikan dan jumlah anggota (*Output*) dibandingkan dengan hasil nyata dari penerapan penegak hukum dan kemampuan peningkatan investigasi dalam mengatasi konflik, akibatnya pemerintah Amerika Serikat mengalami kendala dalam merumuskan strategi keamanan dan efektivitas program yang dijalankan (U.S Government Accountability 2023, 66-67)

Berjalannya waktu ketika geng di Haiti semakin berkembang, *Viv Ansanm* yang berkembang pada tahun 2023, yang menjadi salah satu gabungan dari kelompok geng terbesar G9-and Family Member, geng tersebut menunjukkan dominasinya terlihat dari perkembangannya, dengan strategi dalam mengekspansikan bisnisnya, dan strategi dalam menguasai medan perang, membuat lembaga penegak hukum, dan kebijakan terlambat dalam memahami implikasi strategisnya. Tidak adanya mekanisme *Early Warning* yang memadai dalam kebijakan GFA membuat konsolidasi kekuatan geng dan mendeteksi pergerakan geng menjadi tantangan dalam implementasi GFA (U.S Government Accountability 2023, 32-33).

Keterbatasan informasi dalam implementasi kebijakan juga mempengaruhi pelaksana kebijakan dalam memahami perkembangan situasi di Haiti, dengan peningkatan kelompok bersenjata seperti *Viv Ansanm* yang memiliki strategi lebih unggul dalam melakukan penyerangan pada infrastruktur pendidikan Haiti pada tahun 2024, menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum belum sepenuhnya memahami perubahan dinamika konflik yang terjadi. perkembangan kekuatan kelompok bersenjata lebih masif dibandingkan dengan respon kebijakan *Global Fragility Act*. permasalahan ini menunjukkan pelaksana belum secara maksimal dalam mendapatkan informasi disaat menjalankan kebijakan (Coto, 2025).

Selain fenomena keterbatasan pemahaman kondisi lapangan aspek informasi juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan pelaksana dalam pedoman kebijakan. Pelaksana kebijakan seperti USAID, *Department of States* (DoS) dan POLIFRONT, dan *Haitian National Police* (HNP) yang memiliki tugas utama untuk mengatasi konflik dan meningkatkan stabilitas jangka panjang, belum bisa berjalan secara maksimal akibat sistem evaluasi yang lemah, yang lebih memfokuskan terhadap pemenuhan target kebijakan daripada memastikan bahwa kebijakan benar benar berkontribusi untuk mengatasi konflik (Coto, 2025).

3.2.3 Authority Dalam Pembagian Sumber Daya Kebijakan

Authority atau otoritas yang mencakup peran penting, yang berguna untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan arahan dan menjadi komando dalam berjalannya kebijakan, dalam hal ini selain pemerintah Amerika Serikat menjalankan *Whole of Government Approach* dan mencakup organisasi kemanusiaan dan organisasi internasional, namun dengan kata lain lembaga yang

memimpin dan bertanggung jawab atas kebijakan ini adalah ada *State Department* yang menjadi pemimpin dalam operasi lapangan ini USAID yang menjadi pionir untuk bantuan pembangunan di Haiti, *National Security Council* (NSC) menjadi lembaga yang memastikan bahwa bantuan ini dapat berjalan dengan lancar dari segi keamanan, NSC menjadi lembaga yang menjembatani antara kebijakan luar negeri yang sedang dijalankan dan menjadi pemandu untuk menjalankan kebijakan antara *White House* dengan penerima kebijakan (pemerintah Haiti) (Yayboke dkk. 2021, 3–5).

Bantuan sumber daya dalam implementasi *Global Fragility Act* (GFA) bukan hanya berupa personel, mekanisme kebijakan, dan peralatan yang mendukung implementasi kebijakan. Bantuan tersebut dikirimkan melalui lembaga pemerintah Amerika Serikat, dan organisasi internasional seperti bantuan dana, bantuan kesehatan, serta dukungan keamanan. Dengan pembagian peran yang jelas dari berbagai lembaga pemerintah Amerika Serikat menunjukkan upaya dalam memastikan berjalannya GFA secara terkoordinasi. Sehingga pemenuhan kebutuhan bisa terlaksana (Yayboke dkk. 2021, 5–6).

Dalam implementasi *Global Fragility Act* (GFA) di Haiti meskipun Undang-Undang yang dibentuk merupakan tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat, namun segala keputusan untuk mengendalikan kebijakan domestik Haiti masih menjadi wewenang dari pemerintah Amerika Serikat, dan kewenangan implementor GFA dalam menghadapi kelompok bersenjata masih menjadi tanggung jawab pemerintah Haiti, karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui *Global Fragility Act* hanya berupa bantuan dana, pembangunan infrastruktur, institusi, tidak secara langsung mengatur hukum di

Haiti. Dengan hambatan kasus korupsi yang berada dalam lingkup pemerintahan Haiti membuat keputusan dalam mengatasi geng tidak optimal (Yayboke dkk. 2021, 5–10).

Upaya dalam memastikan kebijakan ini bisa berjalan secara optimal dalam implementasi kebijakan *Global Fragility Act*, meskipun otoritas penuh tetap berada di pemerintahan Haiti, Amerika Serikat tetap memastikan wewenangnya dalam mengatur sektor publik dan sektor swasta, sektor publik diisi oleh lembaga penegak hukum Haiti seperti *Haitian National Police* (HNP), *POLIFRONT Haitian National Border Police*, dan di sektor swasta diisi oleh *non governmental organization* seperti *Alliance for Peacebuilding* dan *Red Alliance* pembentukan kedua sektor ini untuk memastikan pembagian sektor untuk menyelesaikan permasalahan konflik dari akarnya, dengan memprioritaskan sektor publik dalam penegakan hukum dan sektor swasta dalam lingkup membantu mengurangi kemiskinan, membantu masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal (Yayboke dkk. 2021, 3–4).

3.2.4 Facilities, keterbatasan Fasilitas Sebagai Hambatan implementasi Global Fragility Act

Fasilitas menjadi menjadi variabel penting dalam keberhasilan kebijakan publik. Dalam implementasinya fasilitas meliputi berbagai aspek seperti, infrastruktur, sarana dan prasarana, yang memungkinkan pelaksana mengimplementasikan kebijakan secara optimal. Tanpa adanya tujuan kebijakan, fasilitas yang memadai, implementasi kebijakan Publik tidak akan berjalan

dengan maksimal, meskipun Amerika Serikat memiliki anggaran, kewenangan, dan sumber daya manusia, akan sulit dicapai (Edwards 1980, 54–62).

Dampak nyata dari kekurangan fasilitas memiliki konsekuensi seperti, tingkat kriminalitas yang tinggi akibat penjara yang penuh, alih alih menciptakan pelaku kriminal. Selain itu dengan kualitas pendidikan yang tidak memenuhi standar bisa menghasilkan lulusan yang kompeten, lalu yang terakhir dengan adanya ancaman nyata dari kelompok bersenjata yaitu perusakan infrastruktur bisa menimbulkan keamanan nasional yang tidak optimal, kegagalan misi menjadi bukti nyata dari keterbatasan sumber daya (Edwards 1980, 77–79).

Pada masa implementasi GFA, keterbatasan sumber daya sering dijumpai, seperti kelompok bersenjata yang menguasai wilayah strategis perdagangan di pusat kota Haiti. Selain itu kelompok bersenjata juga menargetkan fasilitas publik yang menjadi bagian penting dari kapasitas negara. Februari hingga Mei 2024, dijumpai serangan yang dilancarkan oleh geng *Viv Ansanm* yang termasuk dalam aksi perusakan di Université d'État d'Haïti, kerusakan ini meliputi Fakultas Agronomi, Linguistik, dan Kedokteran. Selain itu, fasilitas lain seperti fasilitas kesehatan dan perpustakaan juga menjadi sasaran kelompok bersenjata. Kerusakan fasilitas ini menjadi bukti nyata dari lemahnya kemampuan negara dalam membangun kapasitas institusional, yang menjadi tujuan utama Amerika Serikat melalui *Global Fragility Act*. dengan perusakan dan penjarahan yang terjadi dalam bidang pendidikan, yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, sementara fasilitas kesehatan yang ikut andil dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional tidak dapat beroperasi secara optimal dengan kerusakan fasilitas, fasilitas kesehatan, tidak

hanya berdampak pada pelayanan publik saja, namun menjadi tantangan dari implementasi kebijakan *Global Fragility Act* di Haiti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan GFA terjadi saling berkaitan dan secara berlapis, sehingga perlu adanya komitmen penuh dari pihak Amerika Serikat dan Pemerintah Haiti dalam mengatasi permasalahan yang tidak kunjung usai (Haiti Libre, 2024).

3.3 *Disposition* sebagai sikap dan perspektif implementor dalam keberhasilan implementasi kebijakan

Sikap dari para perumus kebijakan juga menjadi peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang cukup, komunikasi yang jelas tidak cukup untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, para pelaksana juga harus memastikan adanya komitmen dalam menjalankan, mengarahkan sebuah kebijakan untuk menghindari adanya pergeseran atau *slippage* kebijakan yang bisa membawa pada kegagalan, dengan pasrahnya Haiti yang bingung dalam mengatasi kelompok bersenjata, yang hampir menguasai perekonomian di Haiti membuat negara tersebut membuka bantuan terhadap negara lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, berjalan dari hal ini Amerika Serikat yang juga mengalami kerugian akibat penyebaran narkoba yang banyak disebar dari Haiti, yang berasal dari negara Amerika Selatan, dan berupaya untuk berperang dengan narkoba, ini yang membuat pemerintah Amerika Serikat mencetuskan kebijakan ini dengan harapan untuk meredam penyebaran narkoba dan membuat para warga Amerika Serikat aman dari dampak buruk imigran ilegal dari Haiti, namun dengan tidak konsistennya para pemangku kebijakan ini bisa berdampak pada kegagalan,

karena sering adanya diskresi atau kebebasan bertindak dalam menjalankan tugas akibat keputusan yang disampaikan oleh Haiti dalam mengatasi konflik ini (Edwards 1980, 89–90).

Diskresi pelaksana menjadi salah satu tantangan dalam masa implementasi kebijakan GFA. perbedaan pandangan antara perumus kebijakan dan pelaksana menjadi terciptanya diskresi, terciptanya fenomena ini dikarenakan Amerika Serikat yang menutup USAID pada 2025 oleh Donald Trump yang dinilai hanya merugikan anggaran dana tahunan pemerintah Amerika Serikat, serta obsesi dengan satu program yaitu *Multinational Security Support* (MSS) yang menjadi cabang dari implementasi kebijakan GFA, MSS menimbulkan banyak korban jiwa yang berjatuh dan hancurnya infrastruktur, yang membuat kebijakan GFA mengalami pergeseran kebijakan. Sehingga permasalahan upaya yang tidak konsisten ini mempengaruhi efektivitas implementasi GFA (García Encina 2010).

Terlebih tantangan dari sikap implementor kebijakan Donald Trump selain penutupan USAID menimbulkan permasalahan yang signifikan, yang berakibat logistik, sumber daya manusia pada masa implementasi GFA mendapatkan pengurangan untuk ke negara Haiti, yang membuat GFA tidak berjalan secara maksimal, dan berada diambang kegagalan, dampaknya bagi negara Haiti, selain dari pengurangan sumber daya manusia atau staff, hal ini bisa berdampak pada gangguan layanan kesehatan, dan juga rehabilitasi sosial, karena USAID sangat melihat dan membantu dari segi pelayanan kesehatan Haiti (Acaps 2025, 1–5)

Amerika Serikat juga menggandeng PBB dan membentuk operasi MSS (*Multinational Security Support*) yang dipimpin oleh Kenya, dipilihnya Kenya

oleh *United Nations* melalui adopsi resolusi 2699 pada 2 Oktober 2023 menjadi pemimpin dalam misi MSS karena memiliki pengalaman yang panjang dalam mengatasi konflik dan mendukung perdamaian dan mampu bekerja dengan pemerintah Haiti. kekacauan yang terjadi di Haiti ini menjadi perhatian karena semenjak diturunkannya operasi ini di pusat kota *Port au de Prince* sudah lebih dari 5,600 orang yang terbunuh sejak 2023 pembentukan operasi ini, dan yang menjadi ketakutan dari permasalahan ini MSS akan berakhir di oktober 2025 (Das Peacekeeping, t.t.).

3.3.1 Effect of Dispositions Dalam Implementasi Kebijakan

Dalam sub variabel efek, dijelaskan bahwa perspektif, sikap, dan nilai dari implementor kebijakan bisa mempengaruhi secara nyata jalannya suatu kebijakan publik, dampak dari efek ini adalah terbentuknya zona indifferensi, di mana para implementor tidak memiliki komitmen untuk mendukung atau menolak adanya kebijakan, hal ini bisa berdampak terhadap implementasi yang memiliki banyak hambatan, serta bisa terciptanya *Slippage* atau pergeseran kebijakan, terciptanya pergeseran ini berasal dari kepentingan lembaga, atau organisasi yang memiliki kepentingan tersendiri, atau diskresi. Agar kebijakan bisa sesuai dengan preferensi dari lembaga atau organisasi sendiri (Edwards 1980, 90).

Selain dampak disposisi, efek yang bisa terjadi dari kurangnya komitmen ini adalah penundaan, menjadi respons pelaksana ketika sebuah kebijakan tidak dijalankan sepenuhnya, para pelaksana tidak sepenuhnya dalam menolak kebijakan, namun menunda yang menciptakan keterlambatan dalam proses implementasinya. Penundaan dapat terjadi seperti lambatnya distribusi sumber

daya, pengambilan keputusan, atau tertundanya pelaksanaan program. Penundaan bisa sulit untuk diidentifikasi terkait faktor yang mempengaruhi, karena secara formal sebuah kebijakan masih berjalan namun, proses implementasinya menjadi kurang efektif, terutama dalam proses permohonan yang membutuhkan respon cepat. Oleh karena itu, penundaan menjadi bentuk tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Edwards 1980, 105–107).

Fenomena *zone of indifference* ini terjadi di tahun 2019, dimana pada masa Donald Trump kebijakan GFA ditandatangani sebagai respon dalam kebijakan Amerika Serikat yang pada tahun-tahun sebelumnya lebih mengarah terhadap intervensi militer, dan reaktif. GFA menjadi jawaban dalam mengatasi fenomena tersebut dengan melakukan kebijakan yang berbeda, yaitu menetapkan GFA, namun setelah penandatanganan tersebut Donald Trump tidak langsung menetapkan lima negara utama dalam prioritas GFA. walaupun Donald Trump pada saat itu sudah diberikan tenggat waktu setahun, namun tidak dilakukan. Lalu pada masa Joe Biden kebijakan ini langsung menjadi salah satu prioritas utama Amerika Serikat dalam membantu negara rentan yang mengalami konflik. Hal ini yang mengarahkan bahwa kebijakan GFA pada masa Donald Trump tidak mendukung lalu juga tidak menolak adanya keberlangsungan GFA (Devex and Welsh, 2022).

3.3.2 Staffing the Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan

Dalam komitmen kebijakan publik, penataan staf birokrasi menjadi strategi yang digunakan dalam pemangku kebijakan untuk mengatasi hambatan yang dilakukan atas sikap para pelaksana kebijakan. Dengan terbentuknya diskresi yang dilakukan yang mempengaruhi atas keputusan keberhasilan dan kegagalan

kebijakan, cara yang digunakan dalam mengatasi diskresi ini dengan mengganti personel lama dengan orang-orang baru yang lebih responsif terhadap keinginan perumus kebijakan, salah satu cara lainnya dalam penataan staf dalam kebijakan publik yang ingin diimplementasikan adalah dengan penunjukan eksekutif atau *Appointments*, untuk memastikan setiap lembaga memiliki perannya masing-masing yang kredibel untuk memastikan implementasi kebijakan bisa berjalan dengan maksimal (Edwards 1980, 107–14)

Pada penelitian implementasi kebijakan *Global Fragility Act* (GFA) di Haiti tidak ditemukan upaya dalam penggantian personel dari masing-masing lembaga pemerintahan, meskipun kebijakan GFA berada dalam kepemimpinan yang berbeda yaitu Donald Trump dan Joe Biden, tidak ditemukan permasalahan pada pejabat lembaga pemerintahan Amerika Serikat dan pemangku kebijakan tidak bisa menindak permasalahan domestik Haiti, karena segala wewenang dan penegakan hukum ada pada pemerintahan Haiti. ataupun hambatan seleksi, seperti upaya balas jasa politik. Namun dari temuan penelitian yang ditemukan bahwa pada penutupan USAID pada 1 Juli 2025 oleh Donald Trump, lembaga yang memiliki peran krusial dalam pendistribusian dana dan pembangunan diganti wewenangnya oleh *Department of State*, dan mitra organisasi internasional, diakibatkan dapat merugikan anggaran tahunan Amerika Serikat (Robinson, 2025)

Birokrasi domestik Amerika Serikat tidak memiliki wewenang dalam memindahkan, merekrut, atau memberhentikan aparatur sipil Haiti, karena setiap kewenangan domestik hanya dimiliki oleh pemerintah Haiti, serta kebijakan *Global Fragility Act* hanya menjadi pengawas dalam kebijakan yang meliputi pada bantuan dan mengupayakan pada stabilitas di Haiti. Meskipun Amerika

Serikat menempatkan personel yang kompeten dalam strategi dan pelaksanaan, namun keberhasilan dari implementasi kebijakan bisa bergantung terhadap komitmen pemangku kebijakan (Yayboke dkk. 2021, 3–4).

3.3.3 Incentive Dalam Meningkatkan Komitmen Pelaksana Kebijakan

Incentives menjadi instrumen penting dalam merespon disposisi yang dilakukan pemangku kebijakan, dengan memberikan penghargaan ataupun sanksi agar tujuan kebijakan bisa tercapai, karena dengan mengubah personel birokrasi adalah hal yang sulit dilakukan karena, penggunaan insentif menjadi strategi untuk mempengaruhi arah kebijakan publik. Logika dasar dari penggunaan insentif ini, ketika satu individu akan bertindak ketika ada insentif, hadiah atau sanksi yang diberikan untuk kepentingan tersendiri atau tujuan organisasi. Penggunaan insentif digunakan sebagai alat dalam menyelaraskan kepentingan organisasi atau pribadi melalui implementasi kebijakan (Yayboke dkk. 2021, 107–111).

Dalam implementasi kebijakan *Global Fragility Act* (GFA) di Haiti insentif diartikan sebagai bantuan dana, gaji, pelatihan dan dukungan yang diberikan pada lembaga penegak hukum seperti *Haitian National Police* (HNP). pemberian insentif ini sebagai dukungan stabilitas negara, dan upaya pencegahan konflik. Hambatan yang ditemukan dalam implementasi GFA adalah permohonan kenaikan gaji yang diharapkan oleh personel kepolisian Haiti karena tingkat kemiskinan yang tinggi, membuat kebutuhan para warganya membutuhkan pendapatan yang lebih tinggi, dilema permohonan kenaikan gaji tersebut menjadi pertimbangan karena dengan kenaikan gaji yang disampaikan seluruh lembaga

yang turut serta dalam GFA harus mendapatkan kenaikan yang sama, dan menjadi penolakan karena penetapan bantuan dana kebijakan yang sudah tetap (UNSC, 2023, 3).

Dinamika kebutuhan hidup yang tinggi di Haiti memaksa personel *Haitian National Police* untuk melakukan *Moonlighting* atau meninggalkan kewajibannya, untuk bekerja dalam sektor swasta keamanan dan penjualan senjata api ilegal untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan rendahnya kesejahteraan aparat yang tidak dipenuhi oleh pemerintah Haiti, yang membentuk komitmen dari penegak hukum menurun dan berpotensi pada konflik kepentingan (UNSC, 2023, 1-3).

3.4 Structure Bureaucracy Dalam Mengatur Kebijakan Publik

Struktur birokrasi yang dibentuk pada implementasi kebijakan menjadi faktor krusial, pembentukan struktur ini menjadi upaya dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan yang diinginkan, struktur birokrasi ini juga menjadi pemimpin tertinggi dari berjalannya sebuah kebijakan dan menjadi penanggung jawab untuk memutuskan kebijakan dalam sehari-hari dengan cepat dan membentuk keseragaman, dari pembentukan struktur birokrasi ini menciptakan SOP (*Standard Operating Procedures*) untuk memastikan sebuah kebijakan bisa berjalan dengan standar yang telah ditentukan, tanpa keluar dari jalur, untuk menghindari adanya *slippage* atau pergeseran kebijakan dan menghindari *goal displacement* atau pergeseran tujuan (Edwards 1980, 112–14).

Dibentuknya birokrasi *Global Fragility Act* (GFA) ditujukan untuk mengatasi permasalahan konflik di negara rentan, dengan melibatkan banyak lembaga kebijakan bisa terhindari kegagalan, GFA dalam implementasinya melibatkan berbagai lapisan, seperti *National Security Council* (NSC), *Department of State* (DoS), *U.S Agency for International Development* (USAID), Pemerintah Haiti, *Caribbean Community* CARICOM, *United Nations* (UN), *International Monetary Fund* (IMF) serta mitra GFA seperti *Alliance for Peacebuilding* dan *Red Alliance*. Peran dari masing-masing lembaga kebijakan GFA terbagi sebagai berikut: (Yayboke dkk. 2021, 5–10).

1. Presiden Amerika Serikat: menetapkan arah kebijakan, mengesahkan strategi.
2. *National Security Council*: sebagai perumus strategi keamanan serta penyelarasan kebijakan.
3. *Department of State*: implementor lapangan, memimpin upaya diplomasi, dan sebagai pemimpin sekretariat antarlembaga kerja.
4. *Department of Defence*: menyediakan bantuan pertahanan, serta dukungan pertahanan
5. USAID: mengatur pendistribusian keuangan, upaya pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan
6. Pemerintah Haiti: mengatasi konflik, penegak hukum.
7. *International Monetary Fund*: memastikan tidak terjadi krisis ekonomi, memberikan bantuan pinjaman dana.
8. *United Nations*: membantu menangani konflik, bantuan kemanusiaan.

9. *Caribbean Community*: koordinasi diplomatik, stabilitas kawasan
10. *Alliance for Peacebuilding*: memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, bagi anak-anak dan perempuan.
11. *Red Alliance*: memberikan bantuan kemanusiaan (Yayboke dkk. 2021, 5–10).

Pembentukan birokrasi selama implementasi kebijakan menjadi sangat penting, meskipun implementor memiliki sumber daya yang cukup, informasi, keinginan, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk mengimplementasikan kebijakan, terdapat halangan dan kekurangan yang bisa saja terjadi dalam struktur organisasi birokrasi tersebut. Prinsip yang digunakan dalam GFA, yaitu *Whole of Government Approach* merupakan pembentukan birokrasi yang memudahkan dalam koordinasi antar lembaga, dalam GFA *Department of State* yang mengkoordinasikan keamanan dan prioritas yang terjadi dilapangan, NSC (*National Security Council*) yang menjadi penanggung jawab dari GFA, mengatur segala strategi pembentukan SOP dan komite kebijakan, agar implementasi tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, USAID yang memimpin bantuan pembangunan, dan fungsional seperti *conflict prevention and stabilization* di Haiti, dan *Department of Defence* atau DoD (Yayboke dkk. 2021, 4–7).

Pembagian tugas antar lembaga dalam implementasi *Global Fragility Act* (GFA) yang meliputi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang jelas. Lembaga pemerintahan seperti *Department of State*, *Department of Defence*, dan USAID melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan laporannya mengenai kegiatan dan perkembangan program terhadap *National Security Council*, dan

diumumkan hasilnya melalui Kongres, termasuk upaya penanganan konflik, mengevaluasi program dan capaian kebijakan (Yayboke dkk. 2021, 9–10).

3.4.1 Standard Operating Procedures Dalam Mengatur Kebijakan Global Fragility Act

Salah satu aspek utama dalam *Structure Bureaucracy*, SOP menjadi pedoman, prosedur, yang digunakan oleh organisasi dan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas secara konsisten dan bisa memberikan arah yang jelas kepada pelaksana kebijakan, mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan publik. Dengan adanya standar prosedur operasi pelaksana bisa mengetahui tugas, mekanisme kerja, dan tanggung jawab yang harus diikuti guna menghindari risiko perbedaan interpretasi dan kesalahan dalam implementasi kebijakan (Edwards 1980, 125–133).

Menurut Edwards, SOP terbagi menjadi dua sisi, di satu sisi bisa meningkatkan efektivitas dari implementasi, karena menciptakan konsisten, dan standar kerja yang jelas. SOP bisa membantu antar lembaga dalam memastikan koordinasi antar lembaga dan dapat memastikan kebijakan sesuai dengan yang diimplementasikan. Namun dengan SOP yang kaku juga bisa menciptakan hambatan terutama dalam kondisi lapangan yang membutuhkan respon cepat dan dinamis, hambatan tersebut bisa mempengaruhi dari pengambilan keputusan kebijakan (Edwards 1980, 132–133).’

Dalam implementasi GFA di Haiti, terdapat standar operasi prosedur yang dijalankan. Seperti, koordinasi antar lembaga yang harus mendapatkan persetujuan dari berbagai lembaga pemerintahan Amerika Serikat yang terlibat dalam GFA, dalam prosedurnya lembaga pemerintah memiliki *Country Plan* yang

harus diperbarui sebagai upaya dalam bantuan yang direncanakan. Koordinasi antar lembaga ini meliputi pembagian kerja yang diantaranya, mekanisme koordinasi, evaluasi berkala, dan prosedur pelaporan, untuk memastikan kebijakan bisa sesuai dengan target, dan bisa menjadi upaya jangka panjang dalam masa implementasinya (United States Congress, 2019)

Bentuk nyata dari standar operasi prosedur lainnya adalah dengan penetapan Haiti dalam 10 tahun penerapan kebijakan *Global Fragility Act*, penetapan kebijakan yang sebelumnya selama lima tahun dan menjadi sepuluh tahun merupakan rencana strategis yang menjelaskan SOP dari pedoman pelaksanaan kebijakan, melalui dokumen yang dirumuskan melalui kongres menjelaskan bahwa setiap lembaga mendapatkan pembagian tugas, tujuan, dan mekanisme koordinasi. Dengan demikian penetapan prosedur yang selaras membuat kebijakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan GFA (Yayboke dkk. 2021, 2–3).

3.4.2 Fragmentation Dalam Kebijakan Global Fragility Act

Fragmentasi atau penyebaran keamanan dan keamanan dalam implementasi kebijakan adalah faktor penting dalam struktur unit organisasi yang berada di dalam pembentukan kebijakan, dalam terbentuknya sebuah proses fragmentasi adalah karena tekanan politik yang terjadi dalam pembagian kekuasaan, keinginan sebuah komite legislatif, dalam mempertahankan wilayah kekuasaan, serta ada keterlibatan kepentingan dari salah satu lembaga dalam melindungi akses khusus mereka ke dalam birokrasi (Edwards 1980, 105–107).

Namun, koordinasi yang meliputi berbagai lembaga pelaksana sering mengalami kendala yang membuat pelaksanaan kebijakan berjalan tidak optimal

untuk menghilangkan dominasi dari kelompok bersenjata, kebijakan GFA di tahun 2025 akan gagal, pertama karena program MSS (*Multinational Support Security*) yang berakhir karena menjadi upaya yang secara langsung mengatasi konflik geng, diberhentikannya program MSS menambah pelik dari upaya penyelesaian dominasi geng di Haiti (Das Peacekeeping, t.t.).

Fragmentasi menjadi hal krusial dalam berjalannya GFA di Haiti, dengan pembagian tugas yang jelas antar lembaga keamanan, terlebih oleh penegak hukum membuat permasalahan dominasi geng di Haiti menjadi meredam, kolaborasi antar lembaga menjadi hal krusial dalam memastikan koordinasi dalam penanganan keamanan di Haiti, seperti POLIFRONT, yang menjadi garda terdepan dari lembaga untuk patroli perbatasan di Haiti, dan BLTS (*Brigade de Lutte Contre le Trafic de Stupéfiants*) sebagai spesial unit Polisi Nasional Haiti yang memerangi narkoba di Haiti, dan yang terakhir *Haitian National Police* yang menjadi penegak hukum dalam mengatasi konflik geng (Carpentier dan Yee, t.t.-a, 10–12).

Stabilitas keamanan Haiti yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, namun, kurangnya koordinasi antar lembaga yang membuat institusi bekerja secara terpisah yang menimbulkan hambatan dalam permohonan bantuan yang diajukan, karena konflik yang terjadi di Haiti cenderung membutuhkan respon yang cepat. Oleh karena itu, dengan kurangnya koordinasi dan berjalannya lembaga penegak hukum di Haiti yang berjalan sendiri menjadi tantangan serius bagi pemerintah, dengan memastikan semua lembaga dapat mengatasi permasalahan birokrasi yang tidak konsisten menjadi kunci dalam berhasilnya sebuah kebijakan, dan menjadi tujuan bahwa dengan semua bagian,

dan tujuan yang sama tanpa adanya kepentingan tersendiri menjadi hal yang harus dicapai (Carpentier dan Yee, t.t.-a, 12–15).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan *Global Fragility Act* (GFA) dalam mengatasi konflik geng yang terjadi di Haiti masih belum bisa menjadi jawaban dari permasalahan pemerintah Haiti yang kehilangan legitimasi akibat geng berusaha untuk menguasai negara tersebut. Serta kebijakan GFA dalam memberantas narkoba. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan, yang ditulis oleh George C. Edwards III, dijelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi faktor dalam berhasilnya sebuah kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dalam variabel komunikasi, penyampaian kebijakan belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, masih banyak penyampaian yang tidak optimal, karena kurangnya konsistensi dan koordinasi lapangan antar lembaga, dan pembuat kebijakan. Pada aspek sumber daya banyak sekali ditemukan permasalahan seperti lembaga yang mengatur otoritas pengambilan informasi yang tidak menurunkan stafnya, pemberhentian USAID pada masa Donald Trump yang membuat hambatan pada pembangunan.

Dalam aspek disposisi, didapati bahwa komitmen yang diberikan pada dua pemimpin ini sangat berbeda, pada masa Joe Biden, segala komunikasi, sumber daya, menjadi prioritas utama tanpa ada halangan, namun berbeda dengan masa Donald Trump, USAID yang menjadi lembaga yang memiliki peran krusial dalam pembangunan bagi Haiti ditutup, karena dinilai hanya merugikan anggaran tahunan Amerika Serikat, dan sangat mempengaruhi dari keberlanjutan GFA,

kepentingan yang berbeda antar kepemimpinan ini menimbulkan bias yang bisa membentuk parokialisme, yang dimana tujuan sosial yang menjadi tujuan utama dari GFA ini menjadi tersingkirkan dengan kepentingan satu negara, dengan pendekatan *Whole of Government Approach*, yang seharusnya bisa memperkuat dari sistem birokrasi antar lembaga, namun malah melahirkan permasalahan baru karena sistem birokrasi yang kompleks dan sistem birokrasi yang lambat, dapat diartikan secara keseluruhan bahwa, melalui empat faktor variabel yang digunakan dalam penelitian ini bahwa GFA Amerika Serikat masih mengalami berbagai hambatan, kurang efektif dan berada dalam ancaman kegagalan.

4.2 Rekomendasi Penelitian

Rekomendasi yang penulis sematkan pada tulisan ini adalah, perbandingan keputusan pemimpin antara Joe Biden dan Donald Trump, guna memperdalam apakah GFA bisa lebih efektif pada stabilitas atau kepentingan Amerika Serikat seperti imigrasi atau keamanan, dan mengkaji lebih dalam terkait efektivitas prinsip *Whole of Government Approach* yang menjadi andalan dalam kebijakan GFA.

DAFTAR PUSTAKA

- Acaps. 2025. Haiti Anticipated implications of US funding freeze.
- Albanese, Mary Grace. 2017. Translated Subjects: Visions of Haiti in 19th-Century Literary Exchange. <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8348XZ3>.
- Amaritasari, Indah P., dan Sri Bagas Sugiharto. t.t. The Security Landscape of Human Protection from the International Law Perspectives on Case of the New-Taliban-Afghanistan State.
- Angelo, and Gevarter. 2021. The Assassination of Haitian President Jovenel Moise: What to Know. <https://www.cfr.org/articles/assassination-haitian-president-jovenel-moise-what-know>.
- Angulo, A. J. 2011. "Education During the American Occupation of Haiti, 1915-1934." Historical Studies in Education / Revue d'histoire de l'éducation, advance online publication, Januari 7. <https://doi.org/10.32316/hse/rhe.v22i2.2357>.
- Bateman, Kate. 2018. U.S. Public Opinion on Addressing State Fragility. April 18.
- Bayoumi, Imran. 2024. Haiti's Chaos Shows How Far U.S. Stability Efforts Have to Go. Maret 11. https://foreignpolicy.com/2024/03/11/haiti-chaos-gang-violence-us-stability-fragility-act/#cookie_message_anchor.
- Bennett, W. Lance, dan Shanto Iyengar. 2008b. "A New Era of Minimal Effects? The Changing Foundations of Political Communication." Journal of Communication 58 (4): 707–31. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2008.00410.x>.
- Campbell, Susanna. 2024. "Creating an Accountability Framework that Serves the Global Fragility Act's Mission." January 2020, Oktober 31. <https://www.borgenmagazine.com/about-the-global-fragility-act/>.
- Campbell, Susanna P. 2020. Implementing The Global Fragility Act From Policy to Strategy. April.

- https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-04/Implementing_the_Global_Fragility_Act_April2020.pdf.
- Carpentier, Chloe, dan Sonya Yee. 2024. General Coordination and Content Overview: Angela Me (Chief, RAB).
- Charles and Weaver. 2026. "Prosecutors map out South Florida links to Haiti president's assassination." March, Maret.
- Çiçek, Aylin, and Giray Gerim. 2024. State Failure and Fragility Causes, Cases, Discussions. Istanbul University Press.
<https://doi.org/10.26650/B/SS30.2024.026>.
- Corinne Graff. 2020. [addressing_fragility_in_a_global_pandemic_elements_of_a_successful_us_strategy-pw](#). Desember 17.
- Das Peacekeeping, Chandrima. 2025. Sharing the Burden of Securing Haiti.
<https://www.stimson.org/2025/sharing-the-burden-of-securing-haiti/>.
- Daruhadi and Sopiati. 2024. Pengumpulan Data Penelitian. 3.
<https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/5181>.
- Devex and Teresa Welsh. n.d. "US announces Global Fragility Act countries and region — finally." Accessed 2022.
<https://www.devex.com/news/us-announces-global-fragility-act-countries-and-region-finally-102986>.
- Coto, Danica. 2025. "US designates Haitian gangs as a foreign terror organization as experts warn of impact on aid."
<https://docs.google.com/document/d/1cYvyyRrRKcfMlhDb4PzIEOLjNlsbMN-CUn78U0A1nDM/edit?tab=t.0>.
- Zuchri Abdussamad, 2021. Metode Penelitian Kualitatif.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian&ots=vDHzw-4aQ3&sig=S66f5xbvAVX_14lI2v4kc5qOMXA&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian&f=false.
- Encina and Carlota. 2010. Haiti: the US and Military Aid in Times of Natural Disaster (ARI).
<https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/haiti-the-us-and-military-a>

id-in-times-of-natural-disaster-ari/.

Fukuyama, Francis. 2014. *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*. Messenger Lectures. Cornell University Press.
<https://doi.org/10.7591/9780801455360>.

George C. Edwards III. 1980. *Implementing Public Policy (Politics and Public Series)*.

Harry Rouzier, Georges. 2021. Haiti: Earthquake leaves mounting death toll, injuries and extensive damage.
<https://news.un.org/en/story/2021/08/1098032>.

Haiti Libre. 2024. "Haiti - Crisis : Impacts of insecurity on higher education, OPC calls on the State to act urgently."
<https://www.haitilibre.com/en/news-43159-haiti-crisis-impacts-of-insecurity-on-higher-education-opc-calls-on-the-state-to-act-urgently.html>.

Human Rights Watch. 2025. "US: Trump Administration Guts Foreign Aid Terminating USAID, State Department Programs Devastating for Rights, Lives."
<https://www.hrw.org/news/2025/02/28/us-trump-administration-guts-foreign-aid>.

Ingram, George, and Nancy Lindborg. 2019. *Implementing a Fragility Strategy*.

International Crisis Group. 2025. *Undoing Haiti's Deadly Gang Alliance*. Desember 15.
<https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2025-12/110-haiti-deadly-gang-alliance%20%281%29.pdf#page=1.00&gsr=0>.

Jemima Pierre. 2023. *Haiti as Empire's Laboratory*. Agustus 30.
<https://doi.org/10.1080/10714839.2023.2247749>.

Karla I. Rios and Clare Ribando Seelke. 2024. "Haiti: Recent Developments and U.S. Policy." Congressional Research Service, Februari 1.

Kolbe, Athena R. 2013. "Revisiting Haiti's Gangs and Organized Violence." Instituto Igarapé, Mei, 3.

Luma Nichol. 2023. *Exploiting Haiti through the Global Fragility Act*.
<https://socialism.com/fs-article/haiti-and-the-global-fragility-act/>.

Mathelier, Marvin Dee, dan Tahina Montoya. 2023. *Women In International*

Security.

Muggah, Robert. 2023. Haiti Criminal Markets: Mapping Trends in Firearms and Drug Trafficking.

Outlook, RE. 2018. “Credibility, Communication, and Monetary Policy Procyclicality in Latin America.” International Monetary Fund.

Petryniak, Olga, dan Jon Kurtz. 2020. Towards Resilience: Aligning Humanitarian and Development Action Behind The Global Fragility Act. Mei.

Reitherman, Camilla. 2025. There is no easy fix for Haiti’s crises. But here’s where the US can start. Mei 13.
<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/there-is-no-easy-fix-for-haitis-crises-but-heres-where-the-us-can-start/>.

Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH). 2022. *Violation systématique des droits humains en Haïti : Le RNDDH presse l’Etat à reconnaître la gravité de la situation*.
<https://web.rnddh.org/violations-systematiques-des-droits-humains-en-haiti-lernddh-presse-letat-a-reconnaitre-la-gravite-de-la-situation/>.

Sieff, Michelle. 2020. “What’s the State of Play in the Global Fragility Act Priority Countries?: A Snapshot of US Foreign Assistance and Conflict Trends.” What’s the State of Play in the Global Fragility Act Priority Countries?: A Snapshot of US Foreign Assistance and Conflict Trends.
<https://www.cgdev.org/blog/whats-state-play-global-fragility-act-priority-countries-snapshot-us-foreign-assistance-and>.

Stepputat, Finn, dan Lauren Greenwood. 2013. Whole-of-Government Approaches to Fragile States and Situations.

Tariq, Safiullah, and Sadia Sulaiman. 2023. Understanding State Fragility: Discourse and Conceptual Underpinnings of Fails and Fragile States. 9.

The Borgen Project. 2024. What to Know About the Global Fragility Act. Oktober 31.

Transparency International. 2024. “*Corruption Perception Index*”
<https://www.transparency.org/en/countries/haiti>.

United Nations High Commissioner for Human Rights. 2025. *Situation of human rights in Haiti Report of the United Nations High Commissioner for*

Human Rights.

<https://binuh.unmissions.org/en/rapports-sur-la-situation-des-droits-de-lhomme?>

United Nations Human Right. 2023. *Criminal violence extends beyond Port-au-Prince.*

<https://binuh.unmissions.org/en/rapports-sur-la-situation-des-droits-de-lhomme?>

United Nations Integrated Office in Haiti. 2024. *Quarterly report on the situation of human rights in Haiti (January- March 2024).*

<https://binuh.unmissions.org/en/rapports-sur-la-situation-des-droits-de-lhomme?>

United Nations Integrated Office in Haiti. 2025. *Quarterly Report on the Human Rights Situation in Haiti.*

<https://binuh.unmissions.org/en/rapports-sur-la-situation-des-droits-de-lhomme?>

United Nations Integrated Office in Haiti . 2024. *Quarterly report on the situation of human rights in Haiti (January- March 2024).*

<https://binuh.unmissions.org/en/rapports-sur-la-situation-des-droits-de-lhomme?>

UNFPA Haiti Situation Report #4. 2025. Increasing Violence in Haiti Continues to put the lives of women and girls at risk”

United Nations. 2023. “Security Council Authorizes Multinational Security Support Mission for Haiti for Initial Period of One Year, by Vote of 13 in Favour with 2 Abstentions.” <https://press.un.org/en/2023/sc15432>.

United Nations General Assembly. 2024. *Situation of human rights in Haiti Interim report of the United Nations High Commissioner for Human Rights.* Situation of human rights in Haiti Interim report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*.

United Nations Security Council. 2023. *Report of the United Nations Office on Drugs and Crime pursuant to paragraph 9 of Security Council resolution 2692 (2023).*

United States Congress. 2019. “Global Fragility Act of 2019 116th Congress (2019-2020).”

<https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/727/>

United States Department of States. 2024. “Report to Congress on Evaluation of Activities from the Global Fragility Act.”

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2025/06/Report-Eval-of-Activities-from-the-Global-Fragility-Act-H-Report_006042-Accessible-6.5.2025.pdf.

U.S. Government Accountability Office. 2023. *2023 Annual Report: Additional Opportunities to Reduce Fragmentation, Overlap, and Duplication and Achieve Billions of Dollars in Financial Benefits* GAO-23-106089.

<https://files.gao.gov/reports/106089/index.html>.

United Nations. 2023. Security Council Authorizes Multinational Security Support Mission for Haiti for Initial Period of One Year, by Vote of 13 in Favour with 2 Abstentions. Oktober 2.

United States Department of State. 2020. 2020 - United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability.

<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/2020-United-States-Strategy-to-Prevent-Conflict-and-Promote-Stability-2.pdf>.

United States Department of State. t.t. The U.S. Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability 10-Year Plan for Haiti.